



Bunga Rampai

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI LOKAL

-
-
-
-
-
-
-
-

Bunga Rampai
**PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
EKONOMI LOKAL**

I Made Wahyu Pinantara
Nabilah Firdha Roza
I Kadek Parwata Sedana Putra
Ni Kadek Elen Suryaningsih
I Nyoman Triyana

Bunga Rampai
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI
LOKAL

Penulis:

I Made Wahyu Pinantara, Nabilah Firdha Roza, I Kadek
Parwata Sedana Putra, Ni Kadek Elen Suryaningsih, dan I
Nyoman Triana



Bunga Rampai Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Lokal

Diterbitkan oleh:

UNR Press

Jl. Padma-Kampus Universitas Ngurah Rai, Lingkungan Saba, Kel.
Penatih, Kec. Denpasar Timur, Bali.

Telp. Telp (0361) 462617

Email: ngurahrai-dps@yahoo.com

Copyright © 2024 UNR Press

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk

Apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

All right reserved

Penulis:

I Made Wahyu Pinantara

Nabilah Firdha Roza

I Kadek Parwata Sedana Putra

Ni Kadek Elen Suryaningsih

I Nyoman Triana

Editor:

Yudistira Adnyana, Made Prarabda Karma, I Made Adi Suwandana,
dan I Made Kartika

Ilustrasi dan Sampul Buku:

I Made Dedi Suardika

Tata Letak dan layout:

I Putu Gede Pande Wiratama

QRCBN: 62-7324-3736-444

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul “**Bunga Rampai Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Lokal**” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian terhadap upaya penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting dalam menciptakan kemandirian, ketahanan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Isi buku ini memuat berbagai gagasan, pengalaman lapangan, serta pendekatan praktis dalam pengelolaan desa wisata, pengembangan usaha mikro dan kecil, hingga strategi

peningkatan kapasitas kelembagaan dan promosi digital. Diharapkan, buku ini dapat menjadi inspirasi dan panduan bagi siapa saja yang bergerak di bidang pembangunan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, maupun pengembangan desa.

Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi upaya bersama membangun masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Denpasar, 1 Maret 2025

Tim Penyusun

Daftar Isi

KATA PENGANTARIV

DAFTAR ISIVI

OPTIMALISASI TATA KELOLA ADMINITRATIF DAN MEMBANTU PENGEMBANGAN PROMOSI DESA WISATA KUWUM

I Made Wahyu Pinantara, Ni Putu Yunita Dewi, Ni Kadek Anggreni, Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Bagus Arya Wijaya, I Ketut Soriarta1

PENDAHULUAN 1

METODE 4

HASIL 12

SIMPULAN 17

Saran 18

Penutup 19



**STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN DAN
TANGGUNG JAWAB DALAM PENGEMBALIAN KREDIT
PADA BUMDES DESA ABUAN, SUSUT BANGLI**

Ni Kadek Elen Suryaningsih, I Made Kartika, Gede Sumarda, I Dewa
Made Adhi Utama, I Made Ngurah Sandy Gunawan, Gusti Ngurah Yudi
Mahardika, A.A Gede Plasa Surya Nata 74

PENDAHULUAN 74
METODE 78
HASIL 87
SIMPULAN 98
UCAPAN TERIMA KASIH 99

REFERENSI 100

**PEMANFAATAN BANNER IDENTITAS SEBAGAI MEDIA
PROMOSI BAGI UMKM DI DESA ABUAN KECAMATAN
SUSUT KABUPATEN BANGLI**

I Nyoman Triana, Ni Kadek Selvi Anggreni, Ni Kadek Juni Purwaningsih, Ida
Bagus Gede Indramanik, I Made Sumartana, Fanny Priscyllia, Anak Agung
Putu Oka Saputra 102

PENDAHULUAN 102
METODE 105
HASIL 117
HASIL 118
SIMPULAN 126
SARAN 127
PENUTUP 128
UCAPAN TERIMA KASIH 129

REFERENSI 131

OPTIMALISASI TATA KELOLA ADMINISTRATIF DAN MEMBANTU PENGEMBANGAN PROMOSI DESA WISATA KUWUM

I Made Wahyu Pinantara, Ni Putu Yunita Dewi, Ni
Kadek Anggreni, Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Bagus
Arya Wijaya, I Ketut Soriarta

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah suatu fenomena sosial yang sangat kompleks dan menyatu segala aspek kehidupan manusia. Pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan untuk penataan dan pelayanan terhadap kebutuhan berwisata, sehingga memiliki dampak yang besar sekali terhadap sistem nilai masyarakat, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Dampak yang didasarkan terutama pada lingkungan masyarakat penerima wisatawan melalui adaptasi lingkungan sosial masyarakat. Oleh sebab itu pembinaan dan pengembangan pariwisata harus diletakkan secara mendasar melalui penelitian dan pengkajian, kemudian dituangkan ke dalam pengembangannya pada arah terencana, terarah, terkendali, dan terpadu yang bertujuan untuk memberikan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan

(*stakeholder*) dan nilai kepuasan optimal bagi wisatawan jangka panjang. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan atau berwisata yang dilakukan orang untuk tujuan rekreasi, liburan, atau bisnis, yang biasanya melibatkan pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain di luar tempat tinggal mereka. Manfaat Pariwisata:

1. Meningkatkan perekonomian lokal dan nasional
2. Membuka lapangan kerja
3. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi budaya
4. Membangun hubungan antarbudaya
5. Meningkatkan kualitas hidup

Bali merupakan daerah yang berpotensi di bidang pariwisata dan telah dikunjungi oleh banyak wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah adalah budaya dan keindahan alamnya. Desa Wisata ini yang terletak di Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, berkunjung ke Desa Wisata Alam Dedari, dilihat dari keasrian wilayah desa yang didukung oleh budaya pertaniannya yang masih tradisional. Para wisatawan bisa menikmati pemandangan alam yang masih asri. Penduduk Desa Kuwum mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan menggarap lahan persawahan mereka.

Sebagian penduduk desa kuwum bermata pencaharian sebagai petani namun saat ini desa kuwun akan merambah kedunia pariwisata. Dengan berbekalkan alam yang masih asri dan masih terjaga desa kuwum akan menyajikan beberapa destinasi menari diantaranya *Tracking*, *Cycling* atau wisata bersepeda, serta wisata spiritual dengan tempat melukad di pancoran dedari yang dapat

menjadi landasan untuk mengembangkan desa wisata berbasis ekowisata. Dikarenakan desa kuwum baru akan merintis pada bidang pariwisata maka dari itu masih banyak memiliki permasalahan ataupun kendala yang dihadapi seperti sarana prasarana yang kurang memadai terlebih pada akses jalan, belum adanya persyaratan administrasi seperti AD/ART, MOU, serta profil desa serta belum adanya papan nama dan petunjuk arah untuk destinasi wisata. Selain itu dalam bidang promosi desa wisata juga dirasa kurang aktif. Yang dimana promosi desa sangat berpengaruh besar terhadap keberlanjutan desa wisata tersebut karena melalui promosi desa wisata dapat dikenal oleh banyak wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara

Selain memiliki alam yang masih terjaga keasriannya, terdapat animal cremation di desa kuwum yang dimana dapat menyita perhatian dan dapat menjadi destinasi yang membuat wisatawan memiliki rasa ingin tahu tentang animal cremation tersebut. Tentunya animal cremation atau tempat kremasi hewan masih sedikit dan jarang ditemukan di Bali. Seperti yang kita ketahui bahwa kremasi biasanya dilakukan untuk manusia saja namun pada dasarnya hewan juga perlu untuk diberikan penghormatan yang terakhir.

Program pengembangan desa wisata ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama di daerah pedesaan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu pengembangan desa wisata juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja dan peluang usaha dengan mensinergikan antara pengembangan pariwisata

dan usahausaha yang telah berkembang di desa tersebut. Pengembangan desa wisata diharapkan mampu memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, baik berupa potensi alam maupun potensi budaya yang dimiliki sekaligus mampu melestarikannya sehingga berkelanjutan.

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing, 2001).

METODE

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan wisata didesa kuwum terhadap masyarakat luas baik dengan mempromosikan desa wisata kuwum melalui media sosial ataupun melalui papan nama yang dipasang pada rest area kuwum. Adapun metode yang digunakan yaitu:

1. Metode difusi ipteks yaitu menghasilkan produk yang dapat membantu keberlangsung pada desa wisata kuwum. Beberapa produk yang dihasilkan yaitu berupa draf AD/ART untuk melengkapi administrasi desa wisata kuwum selain itu terdapat pula bagan susunan organisasi untuk desa wisata kuwum, selain dalm bidang adminitrasi kami juga telah memberikan produk yang berupa plang nama dan

petunjuk arah destinasi didesa kuwum yang dipasang di area kuwum dan didepan tempat destinasi seperti tempat penglukadan pancoran dedari dan animal cremation, selain itu adapula pemasangan kotak donasi.

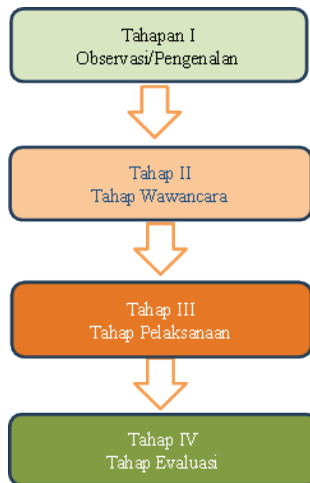
2. Metode Partisipatif

Kegiatan melibatkan pelaku seperti pengelola desa wisata dan pengelola animal cremation dalam setiap pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Selanjutnya, melakukan diskusi kelompok bersama bapak pengelola desa wisata dan pengelola animal cremation.

3. Metode observasi dan survei

Observasi dan survei lokasi untuk memastikan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan desa wisata.

Selanjutnya, melakukan survei terhadap pengelola desa wisata dan pengelola animal cremation.



Gambar 1.1 Tahapan Kegiatan

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat didesa kuwum ini kami menggunakan beberapa tahap untuk merealisasikan program kerja kelompok, yaitu : observasi atau pengenalan ,wawancara, pelaksanaan, dan evaluasi. Kedua metode tersebut digunakan untuk menyusun dan menentukan permasalahan desa wisata yang akan menjadi program kerja Kelompok 6. Program kerja yang diprioritaskan untuk diselesaikan sesuai dengan kebutuhan desa wisata.

1. Tahap Observasi atau Perkenalan

Pada tahap pengenalan ini, bersama dengan anggota melakukan pengamatan secara langsung terhadap potensi wisata yang dimiliki Desa Wisata Kuwum, Badung. Pengamatan ini meliputi potensi alam, potensi budaya serta beberapa usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

a. Melakukan penjajakan kelokasi desa wisata

Untuk mengetahui bagaimana kondisi desa wisata dan apa saja kendala yang terdapat pada proses pengembangan desa wisata. Kegiatan:

- 1) Melakukan penjajakan ke lokasi yang akan dijadikan destinasi wisata didesa kuwum tersebut.
- 2) Melakukan pengenalan kepada bapak pengelola desa wisata dan pengelola animal cremation

b. Study kondisi dan Sumber Daya

Mengevaluasi ketersediaan sumber daya untuk pembuatan dan pemasangan papan nama, petunjuk arah dan kotak dana punia Kegiatan :

- 1) Meninjau lokasi yang strategis untuk pemasangan papan nama, papan petunjuk arah dan kotak dana punia.
- 2) Menghitung biaya pembuatan dan bahan yang akan digunakan
- 3) Memastikan keberlanjutan pemanfaatan papan nama, papan petunjuk arah dan kotak dana punia.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data visual dan deskriptif untuk bahan analisis dan rencana aksi

Kegiatan:

- 1) Pengambilan foto lokasi dan warung sebelum pemasangan banner.
- 2) Mendokumentasikan wawancara atau diskusi dengan pelaku pengelola desa wisata dan pengelola animal cremation.

d. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Merancang langkah implementasi berdasarkan hasil observasi.

Kegiatan:

- 1) Menyusun desain papan nama dan papan petunjuk arah yang mencerminkan desa wisata kuwum
 - 2) Merencanakan timeline pembuatan dan pemasangan papan nama dan papan petunjuk arah .
2. Hasil dari tahap observasi ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa

pembuatan banner dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan desa wisata di wilayah tersebut.

3. Tahap Wawancara

Pada tahap wawancara dengan pengelola Desa Wisata Kuwum didapatkan beberapa permasalahan atau kendala dalam pengelolaan desa wisata kuwum. Setelah memahami permasalahan yang ada, kami dapat menentukan program kerja yang akan dilaksanakan.

Tahap ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan untuk mendukung pengembangan desa wisata kuwum.

Dengan melakukan wawancara mendalam kepada pengelola desa wisata kuwum guna memperoleh kendala yang dihadapi sehingga kami dapat membantu dalam pelaksanaannya.

4. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini adalah proses berjalannya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada Desa Wisata Kuwum, Badung dan sekaligus menjalankan proker yang telah ditetapkan, sehingga dapat membantu dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

a. Persiapan pembuatan papan nama, petunjuk arah dan kotak dana punia

1) Kegiatan :

a) Mempersiapkan desain serta bahan yang akan digunakan

b) Memperkirakan berapa ukuran kayu yang nantinya akan digunakan.

- c) Mempersiapkan bahan cat dan alat-alat yang akan dipergunakan pada saat kegiatan berlangsung

2) Hasil

- a) Papan nama dan petunjuk arah yang siap untuk dipasang.

b. Pemasangan papan nama dan petunjuk arah

1) Kegiatan :

- a) Menentukan lokasi strategis untuk pemasangan papan nama dan papan petunjuk arah, seperti daerah rest area kuwum atau tempat yang mudah terlihat oleh pelanggan.
- b) Melibatkan pengelola desa wisata dalam pemasangan untuk memastikan lokasi sesuai harapan.
- c) Memastikan pemasangan dilakukan dengan rapi dan aman agar tahan lama.

2) Hasil :

Papan nama destinasi dan petunjuk arah terpasang dilokasi yang optimal adalah salah satu faktor kunci keberhasilan pemasaran dan promosi desa wisata kuwum. Memilih lokasi yang tepat untuk pemasangan papan nama destinasi dan petunjuk arah akan meningkatkan efektivitasnya dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan menarik perhatian banyak orang

5. Dokumentasi dan Evaluasi

a. Kegiatan:

- 1) Mengambil dokumentasi berupa foto sebelum dan sesudah pemasangan papan nama destinasi dan petunjuk arah.

2) Mengumpulkan masukan dari pengelola desa wisata untuk perbaikan program serupa di masa depan.

b. Hasil:

1) Dokumentasi lengkap pelaksanaan kegiatan.

2) Data awal terkait dampak penggunaan papan nama destinasi dan petunjuk arah terhadap desa wisata kuwum.

Tahapan pelaksanaan ini bertujuan untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan efektif dan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi UMKM di Desa Kuwum.

6. Tahap evaluasi

Tahap ini adalah tahapan terakhir pelaksanaan program kerja serta mengevaluasi bagaimana selama keberlangsungan pengabdian masyarakat, dan program kerja yang sudah dilaksanakan Tahap evaluasi dalam pengembangan desa wisata melalui pembuatan papan nama destinasi dan petunjuk arah sebagai identitas di Desa Kuwum, bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan dan dampaknya terhadap desa wisata . Berikut adalah langkah-langkah evaluasi yang dapat dilakukan:

a. Evaluasi Hasil Pemasangan Banner

1) Tujuan : menilai kualitas dan keberhasilan pemasangan papan nama destinasi dan petunjuk arah.

2) Kegiatan:

a) Meninjau kembali lokasi pemasangan untuk memastikan papan nama destinasi dan petunjuk arah terpasang dengan baik dan sesuai harapan.

- b) Memeriksa kualitas bahan papan nama destinasi dan petunjuk arah, desain, dan daya tahan terhadap cuaca.
- c) Mengidentifikasi potensi perbaikan teknis, seperti lokasi pemasangan dan ukuran papan nama destinasi dan petunjuk arah

3) Hasil:

Laporan tentang kondisi dan fisik papan nama destinasi dan petunjuk arah serta efektivitas pemasangannya.

b. Evaluasi Dampak Terhadap UMKM

- 1) Tujuan: Mengukur dampak papan nama destinasi dan petunjuk arah serta kotak donasi terhadap perkembangan desa wisata kuwum dan animal cremation.

2) Kegiatan:

Melakukan wawancara atau survei kepada pengelola animal cremation untuk mengetahui perubahan yang dirasakan, seperti, peningkatan jumlah wisatawan yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada hewan kesayangannya.

3) Hasil:

Data dampak banner terhadap promosi dan pertumbuhan UMKM.

c. Dokumentasi dan Penyusunan Laporan Evaluasi

- 1) Tujuan: Membuat laporan evaluasi yang lengkap dan terstruktur.

2) Kegiatan:

- a) Mengumpulkan dokumentasi foto sebelum, selama dan setelah pemasangan papan nama destinasi dan petunjuk arah.
- b) Menyusun laporan evaluasi yang mencakup:
 - (a) Gambaran umum kegiatan.
 - (b) Data hasil wawancara atau survei.
 - (c) Analisis keberhasilan dan rekomendasi.
- 3) Hasil:

Laporan evaluasi akhir yang dapat digunakan sebagai acuan untuk program pengembangan UMKM berikutnya.

Tahap evaluasi ini sangat penting untuk memastikan kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif bagi pelaku desa wisata. Evaluasi yang komprehensif juga membantu memperbaiki program serupa di masa mendatang agar lebih efektif.

HASIL

Dari hasil wawancara dengan pengelola desa terdapat Permasalahan di Desa Kuwum terutama terkait dengan perkembangan Desa Wisata sendiri setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengelola Desa Wisata Kuwum Bapak I Ketut Tastrawan. Dimana seperti yang telah di informasikan dari Bapak Pengelola Desa Wisata bahwa Desa Kuwum baru akan merintis dibidang Pariwisata yang dimana tentu saja masih memiliki beberapa kekurangan dan beberapa masalah yang dihadapi. Masalah tersebut terkait dengan tempat wisata yang masih dalam proses pembagunan, belum adanya petunjuk arah

jalan menuju tempat wisata, belum adanya dokumen administrasi yang mendukung pengembangan dan pengelolaan desa wisata seperti AD/ART, visi misi dari Desa Wisata, serta kurangnya promosi Desa Wisata Kuwum tersebut.

Disamping itu masih ada destinasi yang telah berjalan yaitu Animal Crematorium atau yang lebih dikenal dengan tempat kremasi hewan namun masih belum dikenal banyak wisatawan karena memang belum ada pengiklanan atau promosi yang tersebar luas. Perlu dibuat pengiklanan baik melalui iklan media sosial maupun iklan pada web. Tempat wisata tersebut juga harus melakukan pembaruan agar menarik wisatawan untuk berkunjung.

Melalui program yang telah berjalan dan telah membantu pengelola desa wisata kuwum yang berada di Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam pembuatan draf tata kelola administrasi berupa draf AD/ART , visi misi desa wisata, sipnosis sejarah pancoran dedari yang dimana hal tersebut dapat membantu pihak pengelola desa wisata kuwum untuk mengembangkan lebih dan mampu mengsegerakan pengenalan dan pembukaan desa wisata kuwum

Adapun manfaat yang didapat dalam kegiatan KAT (Kuliah Aplikatif Terpadu) Universitas Ngurah Rai kelompok 6 kuwum 2 yaitu: Kegiatan ini berhasil memberikan landasan administratif, promosi, dan sarana pendukung yang diperlukan untuk memperkenalkan dan mengembangkan Desa Wisata Kuwum. Dengan kolaborasi aktif dari berbagai pihak, desa ini diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Kegiatan pembuatan papan nama penunjuk arah desa wisata, visi misi desa wisata, serta sejarah pancoran dedari bertujuan untuk membantu pengembangan potensi desa melalui Kepala Desa wisata dalam bidang pengelolaan desa wisata kuwum. Dalam proses pembuatan pembuatan papan nama penunjuk arah desa wisata, visi misi desa wisata, serta sejarah pancoran dedari. Hasilnya diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pengembangan pembangunan Desa Wisata kuwum.

Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa negara dan penerimaan asli daerah yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. (Tya Aulia, 2014).

Tentu saja terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarat ini berlangsung seperti pada bidang pembuatan administrasi untuk desa wisata yaitu kurangnya informasi mengenai desa wisata kuwum seperti kurangnya informasi mengenai sejarah dari pancoran dedari yang akan menjadi salah satu destinasi religi yang ada didesa kuwum, mengingat adanya sejarah yang dapat menjadi daya tarik tersendiri yang akan mempengaruhi wisatawan untuk mengunjungi tempat tersebut. Lambannya pemberian keputusan dari aparat desa Kuwum terkait dengan informasi untuk melakukan pertemuan guna membahas lebih lanjut mengenai draf visi misi serta draf AD/ART (anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga), Serta pemberian informasi mengenai bagan struktur kepengurusan desa wisata kuwum.

Disamping itu ditemukan kendala pada bidang pelaksanaan pembuatan sarana prasarana yang dimaksud yaitu pada pembuatan papan nama, papan petunjuk arah serta pengadaan kotak donasi yang dimana kendala yang terjadi yaitu kurangnya informasi mengenai penjual bahan-bahan untuk pembuatan papan nama destinasi, papan petunjuk arah, serta pengadaan kotak donasi seperti toko penjual kayu, cat , striker,dll.

TABEL 1.1 REALISASI KEGIATAN PROGRAM KERJA

No.	Nama program kerja	Keterangan
1.	Pembuatan draf AD/ART ,visi misi, sipnosis sejarah pancoran dedari, serta pengadaan papan susunan organisasi pengelolaan desa wisata kuwum	Terealisasikan
2.	Pengadaan papan nama, papan petunjuk arah serta kotak donasi	Terealisasikan
3.	Promosi desa wisata kuwum melalui media sosial seperti instagra, tiktok, dan youtube	Terealisasikan

Kegiatan KAT Desa Wisata Kuwum

1. Melakukan observasi lokasi untuk mengidentifikasi potensi alam yang terdapat didesa kuwum yang dimana selanjutnya akan dijadikan beberapa destinasi karena memiliki daya tarik yang dimana llingkungan yang masih terjaga keasrian.



Gambar 1.2 Kegiatan observasi lokasi Desa Kuwum

2. Kegiatan pembuatan serta pemasangan papan nama dan papan petunjuk arah yang dimana dipasang pada rest area desa kuwum setelah berkordinasi dengan bapak pengelola desa kuwum terkait lokasi pemasangan papan nama destinasi tersebut. Lokasi tersebut dirasa strategis untuk pemasangan papan nama destinasi karena tempatnya yang berada dekat dengan jalan besar yang banyak dilintasi.



Gambar 1.3 Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Destinasi Desa Wisata Kuwum

3. Melakukan kegiatan survei penduduk desa untuk melengkapi profil dari Desa Kuwum.



Gambar 1.4 Kegiatan survei penduduk desa kuwum

SIMPULAN

Pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Kuwum oleh Kelompok 6 KAT Universitas Ngurah Rai telah berjalan sesuai rencana. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pembuatan dokumen administratif seperti draf AD/ART, visi-misi desa wisata, serta pemasangan papan nama, papan petunjuk arah, dan kotak donasi. Selain itu, promosi melalui media sosial juga dilakukan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola administrasi dan promosi Desa Wisata Kuwum yang masih dalam tahap perintisan. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya informasi dan keterbatasan sarana, program ini berhasil memberikan kontribusi terhadap pengembangan potensi desa sebagai destinasi wisata berbasis ekowisata.

Kegiatan ini berhasil memberikan landasan tata kelola administratif, meningkatkan aksesibilitas, serta memperkenalkan potensi Desa Wisata Kuwum kepada masyarakat luas. Meskipun terdapat beberapa kendala, hasil kegiatan telah memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan desa wisata yang lebih terarah dan berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi langkah awal yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Kuwum.

Saran

1. Peningkatan Promosi Digital

Desa Wisata Kuwum perlu memperluas promosi melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan website resmi. Promosi yang lebih aktif akan meningkatkan daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

2. Penyelesaian Administrasi yang Komprehensif

Penting untuk menyelesaikan dokumen administratif yang belum tuntas, seperti struktur organisasi dan sejarah destinasi wisata. Langkah ini akan memberikan landasan yang kuat untuk tata kelola dan pengembangan desa wisata.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Akses jalan menuju destinasi wisata dan fasilitas umum perlu ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Kolaborasi dengan pemerintah setempat dapat menjadi solusi untuk pengadaan sarana yang memadai.

4. Pelatihan untuk Masyarakat Lokal

Diperlukan pelatihan bagi masyarakat lokal, terutama dalam bidang kependudukan wisata dan pengelolaan destinasi. Hal ini akan meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mendukung keberhasilan desa wisata.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Mengadakan evaluasi rutin terhadap program-program yang telah berjalan untuk memastikan keberlanjutannya. Pengumpulan data dampak program juga penting untuk bahan pengembangan di masa depan.

6. Diversifikasi Destinasi Wisata

Selain destinasi utama seperti Pancoran Dedari dan Animal Cremation, potensi lain seperti wisata pertanian dan seni budaya khas Desa Kuwum dapat dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Penutup

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk pengelola desa wisata dan pengelola animal cremation, masyarakat, dan tim pelaksana. Partisipasi aktif dari semua pihak menunjukkan bahwa pemberdayaan desa wisata dapat berjalan lebih efektif jika didukung oleh keterlibatan komunitas lokal. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk pengembangan, seperti edukasi berkelanjutan tentang branding, strategi pemasaran yang lebih luas, serta pemeliharaan sarana promosi agar manfaatnya tetap berkelanjutan. Diharapkan program ini menjadi langkah awal dalam mendorong desa wisata

di Desa Kuwum untuk berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi desa.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk maju, diharapkan program serupa dapat terus dilaksanakan di masa depan, sehingga semakin banyak pelaku usaha kecil yang terbantu dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas melalui kerjasama dengan desa wisata . Semoga hasil dari program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi desa wisata kuwum dan seluruh masyarakat di Desa Kuwum. Pengembangan desa wisata melalui Pembuatan dokumen administrasi serta sarana prasarana penunjang pengembangan desa wisata di Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung telah berhasil dilaksanakan dengan tujuan utama meningkatkan optimalisasi tata kelola administrasi dan mambantu pengembangan promosi desa wisata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada Universitas Ngurah Rai atas dukungan yang diberikan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Ucapan teriamakasih juga kami sampaikan kepada para aparat desa yang telah memberikan izin dan memberikan sedikit waktunya untuk kami melakukan kegiatan KAT serta seluruh Masyarakat Desa Kuwum Kecamatan Mengwi Kabupaten badung yang telah memberikan izin dan juga dukungan kepada kami sehingga kegiatan KAT ini berjalan dengan lancar. Kami, Mahasiswa Kuliah Aplikatif Terpadu Universitas Ngurah Rai, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar- besarnya atas terlaksananya

program Pengembangan desa wisata melalui Pembuatan dokumen administrasi serta sarana penunjang yang dibutuhkan untuk pengembangan desa wisata kuwum di Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Jagadhita yang telah memberi dukungan, fasilitas dan arahan yang sangat berarti bagi kelancaran kegiatan kami selama berjalannya KAT.
2. Rektor Universitas Ngurah Rai yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan KAT di Desa Abuan, Susut, Kabupaten Bangli. Kami sangat terbantu oleh kebijakan dan perhatian yang diberikan oleh pihak UNR.
3. Ketua LPPM yang telah memfasilitasi dan mengarahkan kami dalam setiap tahapan pelaksanaan KAT. Bimbingan yang diberikan sangat membantu kami dalam mengatasi berbagai tantangan dan mencapai tujuan program KAT.
4. Dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan akademik bagi kami dalam menjalankan tugas ini.
5. Para pengelola desa wisata dan animal cremation di Desa Kuwum, yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan penuh selama pelaksanaan program ini. Antusiasme dan kerja sama yang luar biasa menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan yang terbaik.
6. Perbekel Desa Kuwum beserta Staff dan Aparatur Desa Kuwum, yang telah memberikan izin, arahan, dan dukungan

dalam berbagai bentuk, sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar.

7. Semua pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, tetapi telah memberikan kontribusi nyata dalam kesuksesan program ini

REFERENSI

- LPPMPK. 2024. Buku panduan kuliah aplikasi terpadu UNR 2024
- Sugi Rahayu, 2015. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Kulon Progo. Yogyakarta: Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fajar, 2018. Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
- Purti, 2014. Pengembangan Daya Tarik Kawasan Wisata Bunga Cihideung. Bandung: Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia.
- Eva, Djahmur, Luchman. 2018. *Peran Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata*. Malang: Penerbit Universitas Brawijaya.

PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA BAGI PELAKU UMKM DI DESA KUWUM, MENGWI, BADUNG

Nabilah Firdha Roza, Muhammad Nasori, I Wayan
Putu Sucana Aryana, I Wayan Astawa, I Made Adi
Suwandana

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha kecil yang dianggap memiliki potensi untuk mendukung perekonomian Indonesia, terutama selama masa krisis ekonomi tahun 1998-2000. Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, sektor usaha mikro selalu dianggap sebagai bagian penting, mengingat sebagian besar penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan hidup dari sektor usaha kecil, baik bersifat tradisional maupun modern (Wijayanto dkk, 2023).

Menurut (Karomah, 2023), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat, khususnya di Desa Kuwum, KabupatenBadung. Desa Kuwum

merupakan desa dengan letak yang strategis dari kawasan UMKM yang sudah berkembang dan juga didukung dengan adanya akomodasi-akomodasi UMKM yang sudah ada. Kondisi yang didapatkan di desa Kuwum ini memiliki banyak potensi-potensi yang apabila digarap dapat mendukung program pemerintah badung dalam memajukan industri UMKM di Desa Kuwum, Mengwi, Badung.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh kelompok V Kuwum 1, dapat ditemukan potensi – potensi seperti adanya badan usaha milik Desa (BUMDES), UMKM, Desa Wisata, Subak yang sudah di kunjungi setelah melihat observasi Kelompok V Kuwum 1 memilih mengambil industri UMKM sebagai program utama pada kegiatan Kuliah Aplikatif Terpadu (KAT) hasil wawancara dan survey kepada 8 (delapan) tempat UMKM diantaranya Madu Kele-Kele D’Cupliz, Madu Kele-Kele Sari Madu Sedana, dan Madu Kele-Kele Bali, Jajan Bali, Jamu Biang Sayu , Krisna Susu Kedelai, Bumbu Rajang Aya Bajang, Bumbu Rujak Mang Ata, untuk menuju lokasi ini berdekatan dan masih dalam satu wilayah dan tempat UMKM ini sangat strategis di daerah pariwisata dan akses jalan menuju lokasi masih dalam suasana pedesaan serta aktivitas yang masih tradisional yang mampu menambah daya tarik sebagai desa wisata terhadap wisatawan domestik dan mancanegara.

Menurut (Girindra dkk, 2023), setiap tahunnya, banyak usaha baru yang bermunculan, seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Keberadaan UKM sangat berperan penting bagi negara berkembang karena dapat menyerap tenaga kerja,

mengurangi pengangguran, dan membantu mengatasi masalah kemiskinan. Konsep pemasaran menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan targetnya, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, menjaga loyalitas pelanggan menjadi faktor penting dalam menciptakan keberlanjutan bisnis. Kepuasan pelanggan yang mampu membangun loyalitas merupakan elemen krusial dalam keberhasilan perdagangan dan ketahanan pengusaha di tengah persaingan (Wijandari and Sumilah, 2021).

Salah satu program pemerintah Kabupaten Badung adalah untuk memajukan industri UMKM di Desa Kuwum, Mengwi, Badung, dengan tujuan agar lebih dikenal luas serta membantu pelaku UMKM dalam proses administrasi perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Sertifikat Halal. Berdasarkan hal ini, diperlukan pendampingan terkait perizinan PIRT dan Sertifikat Halal bagi pelaku UMKM di Desa Kuwum. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, meningkatkan pemahaman pelaku UMKM, serta mendorong mereka untuk mengurus PIRT dan Sertifikat Halal, sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk dan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut (Verawati dkk, 2021)

Industri rumahan dan UMKM yang menjadi pendorong utama ekonomi desa perlu bangkit dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Hal ini sangat penting mengingat kenyataan yang ada, di mana banyak pelaku usaha dan UMKM di Desa Balangan,

Kuwum, Mengwi, Badung yang masih mengandalkan metode pemasaran konvensional, dibandingkan dengan pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan dan memperkuat kembali usaha-usaha tersebut, salah satunya yaitu memberikan wawasan kepada masyarakat. Dengan kemandirian masyarakat akan tercipta melalui keterlibatan langsung masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses perubahan. Pemberian wawasan pada masyarakat merupakan sebuah upaya yang tersusun dan terarah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan serta menciptakan kemampuan Masyarakat dalam mengelola usaha (Qomar dkk, 2022). Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing global, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Keberadaan sektor UMKM telah membantu mengurangi angka pengangguran, karena memberikan peluang kerja bagi angkatan kerja yang belum terserap di sektor lain. Sektor UMKM terbukti menjadi tulang punggung perekonomian yang kokoh. Dalam merencanakan suatu usaha, penting untuk melakukan studi kelayakan guna memastikan bahwa usaha tersebut memiliki potensi yang baik. Selain itu, pengembangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan terhadap program-program yang dijalankan. Pemberdayaan sendiri mengacu pada kemampuan kelompok rentan untuk mengakses sumber daya produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan.

Analisis kelayakan memeriksa berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan keberhasilan atau kelayakan suatu usaha. Namun, dalam praktiknya, banyak pemilik usaha yang lebih fokus pada pendapatan dan keberlanjutan bisnis tanpa memperhatikan aspek lainnya. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat melalui metode pendampingan sosial menjadi sangat penting untuk membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Pendampingan ini dapat memberikan bimbingan, pelatihan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk memastikan usaha mereka berjalan dengan lancar dan dapat berkembang dengan baik. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha mereka, sehingga berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal dan nasional.

Pengembangan sektor UMKM harus didasarkan pada prinsip pemberdayaan yang melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendampingan sosial tidak hanya sebatas memberikan pelatihan teknis, tetapi juga melibatkan pembinaan aspek mentalitas kewirausahaan dan pengelolaan bisnis secara berkelanjutan. Pemberdayaan yang dimaksudkan adalah proses yang melibatkan peningkatan kapasitas UMKM dalam mengakses pasar, memanfaatkan teknologi, serta memahami prinsip-prinsip manajemen yang baik. Selain itu, analisis kelayakan juga harus melibatkan evaluasi terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap usaha, sehingga setiap UMKM yang berkembang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas sekitar.

Penting bagi pengusaha UMKM untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aspek keuangan dan pemasaran yang efektif, serta strategi pengembangan produk yang dapat bersaing di pasar yang semakin dinamis. Sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut, pendampingan sosial perlu mencakup juga pelatihan dalam hal pemasaran digital, manajemen risiko, dan adaptasi terhadap perubahan tren pasar yang semakin cepat. Dengan dukungan yang tepat, sektor UMKM dapat terus berkembang dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian lokal dan nasional (Sulaeman, 2020).

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan dalam usaha UMKM pada Desa Kuwum dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2024, dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang melibatkan desa atau peran organisasi UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, kegiatan pendampingan serta kegiatan berupa pengembangan kemasan produk dan logo halal.

2. Monitoring

Kegiatan monitoring dilakukan setelah kegiatan sosialisasi mengenai UMKM bersamaan dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan narasumber. Monitoring yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan UMKM dalam pengembangan kemasan produk, kegiatan yang telah dilakukan serta sebagai

sarana untuk melihat perkembangan dan ketercapaian kegiatan pengabdian yang telah dilakukan.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkolaborasi dan bersinergi dengan fakultas serta program studi terkait sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Program pengabdian ini dilaksanakan mulai 8 September 2024 hingga 30 November 2024 di Desa Kuwum, Mengwi, Badung. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengembangan produk industri rumah tangga, yang telah berhasil mencapai berbagai hasil positif yang signifikan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, program ini tidak hanya fokus pada perizinan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal, tetapi juga mencakup peningkatan digital marketing UMKM secara komprehensif (Nashoih dkk, 2023).

Pendampingan pengurusan Nomor Ijin Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan Sertifikat Halal yang dilakukan oleh Kelompok V Kuwum 1 kepada pelaku UMKM menggunakan narasumber dari pihak Ibu Rupani, SE. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk membuka wawasan kepada para pelaku usaha UMKM pentingnya melakukan proses hingga produk UMKM diproduksi mampu mendapatkan sertifikat halal (Budiwidyansyah dkk, 2024). Pendampingan serta bantuan langsung mempermudah proses pendaftaran sekaligus meningkatkan kepercayaan diri UMKM dalam

melakukannya. Edukasi mengenai pentingnya pendaftaran NIB dan PIRT memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada UMKM dan mendorong mereka untuk segera mendaftar. Pelatihan yang diberikan kepada UMKM terkait prosedur pendaftaran membantu mereka memahami prosesnya dengan lebih baik dan merasa lebih percaya diri dalam menjalankannya. Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah izin yang wajib dicantumkan pada kemasan produk olahan makanan yang dipasarkan kepada masyarakat. Izin ini hanya diberikan kepada produk olahan pangan dengan risiko rendah.

Memiliki PIRT memberikan berbagai manfaat dan keunggulan bagi produk pangan. Persaingan di sektor produk makanan semakin ketat dengan hadirnya berbagai produk pangan modern yang dilengkapi hasil uji laboratorium untuk menjamin keamanannya. Tanpa izin PIRT, produk-produk pangan dari UKM berisiko tergeser dari pasar, yang pada akhirnya dapat merugikan pelaku usaha industri rumahan (Astuti Musaid dkk, 2019). Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) masih kurang memahami pentingnya dan manfaat dari produk pangan yang memiliki sertifikat PIRT. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran mereka untuk mendaftar izin tersebut. Padahal, dengan memiliki sertifikat PIRT untuk setiap produk pangan yang dihasilkan, pelaku usaha dapat menikmati berbagai keunggulan. Berikut beberapa manfaat produk pangan yang telah memiliki izin PIRT:

1. Produk Layak Edar

Produk yang telah memiliki sertifikat PIRT dipastikan memenuhi syarat untuk beredar di pasar. Dengan terdaftar

resmi di dinas kesehatan, produk tersebut tidak menghadapi larangan peredaran. Keunggulan ini juga memberikan daya saing lebih terhadap produk sejenis di pasar.

2. Pemasaran yang Lebih Luas

Selain layak edar, produk dengan sertifikat PIRT dapat dipasarkan secara lebih luas di seluruh daerah lokal Indonesia. Dengan akses pasar yang lebih besar, produk tersebut memiliki peluang untuk dikenal dan diminati oleh lebih banyak konsumen, sehingga meningkatkan potensi penjualannya.

3. Keamanan dan Kualitas Terjamin

Proses pendaftaran PIRT melibatkan uji dan seleksi ketat dari dinas kesehatan, baik terhadap produk maupun pelaku usahanya. Pengusaha juga mendapat edukasi melalui bimbingan khusus mengenai bahan pangan. Setelah lolos tahapan ini, sertifikat PIRT diberikan, memastikan keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan.

4. Peningkatan Kepercayaan Konsumen

Konsumen saat ini semakin cerdas dan teliti dalam memilih produk. Mereka lebih percaya pada produk yang memiliki informasi izin resmi pada kemasannya. Adanya sertifikat PIRT pada produk pangan akan meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga mereka lebih yakin untuk membeli dan mengonsumsi produk tersebut (Astuti Musaid dkk, 2019).

Peraturan di bidang perizinan telah diberlakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak Mei 2018. Peraturan ini mendorong para pelaku usaha untuk segera

mengurus NIB sebagai identitas resmi perusahaan. Dengan memiliki NIB, pengusaha dapat merasakan kemudahan dalam proses legalisasi usaha mereka. Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai dasar untuk mengakses berbagai fasilitas pendukung usaha, seperti pembiayaan, pelatihan, dan program pemerintah lainnya yang bertujuan mendukung pertumbuhan UMKM (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022).

Menurut (Setyawan dkk, 2022), Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu syarat penting untuk menjalankan usaha. NIB berfungsi sebagai identitas bagi para pelaku UMKM yang perseorangan maupun non-perseorangan. Selain itu, NIB juga menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan kemudahan berusaha, seperti pengurusan izin komersial, pendaftaran produk, serta partisipasi dalam program pendukung usaha yang disediakan oleh pemerintah. Dengan memiliki izin usaha, UMKM mendapatkan perlindungan hukum yang memungkinkan mereka beroperasi secara sah.

Proses penerbitan izin usaha dirancang untuk dipercepat sesuai dengan standar layanan, memberikan kepastian waktu dan biaya. Izin usaha diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sertifikat atau dokumen resmi sebagai bukti legalitas. Melalui situs ini, tersedia fitur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, banyak pelaku UMKM yang masih kurang memahami teknologi digital, sehingga di adakan sosialisasi untuk membantu mereka memahami pentingnya NIB ini dalam suatu usaha (Aji Putra dkk, 2022). Salah satu tujuan penerbitan NIB adalah mempermudah pemilik usaha dalam mendapatkan akses permodalan, baik berupa bantuan alat penunjang, modal uang,

dana pengembangan usaha, maupun memperluas pemasaran produk. Saat ini, penerbitan NIB dapat dilakukan melalui sistem elektronik terintegrasi yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS).

Namun, sebelum itu, diperlukan edukasi kepada pemilik usaha UMKM mengenai pentingnya pendaftaran Nomor Induk Berusaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki peran penting bagi pelaku usaha atau UMKM. NIB berfungsi sebagai pengesahan usaha oleh Pemerintah, izin edar, dan indikator kepercayaan terhadap suatu produk. Produk yang telah memiliki NIB akan lebih mudah dipasarkan dan mendapat kepercayaan konsumen. Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai identitas resmi bagi UMKM, baik individu maupun kelompok. Pemilik usaha yang memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha, izin komersial atau operasional, serta bersaing untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (Sutantri dkk, 2022).

Desain kemasan memiliki peran penting bagi sebuah perusahaan karena menjadi representasi visual dari budaya perusahaan, sejarah, dan posisi perusahaan di pasar. Setiap perusahaan memiliki desain kemasan yang berbeda, mulai dari yang dirancang dengan konsep matang hingga yang dibuat sederhana. Konsistensi dan kualitas citra merek dalam pikiran konsumen sangatlah penting agar perusahaan mudah dikenali dalam setiap komunikasi yang dilakukan. Desain kemasan, termasuk logo di dalamnya, menjadi elemen identitas utama saat sebuah

perusahaan atau organisasi baru diluncurkan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bisnis yang dikelola secara individu, berbasis rumah tangga, atau berskala kecil, yang berkontribusi signifikan dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Aryana dkk, 2023).

Dengan demikian, UMKM memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pemasaran, mengembangkan usaha, menjalin kerjasama, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk. Selain itu, UMKM juga mendapatkan kepastian perlindungan hukum sesuai dengan lokasi usaha yang ditentukan, serta kesempatan untuk menerima pemberdayaan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah (Sutantri dkk, 2022).

Pemberian label atau Sertifikasi Halal pada produk kini tidak hanya menjadi kebutuhan dan tuntutan konsumen untuk memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi, tetapi juga telah berkembang menjadi tren dalam strategi pemasaran (Wilson and Liu, 2010). Menurut (Che Mahmood & Abd Mansor, 2014), industri pasar halal berkembang dengan pesat berkat faktor demografi yang mendukung. Kondisi ini mendorong pelaku usaha di Indonesia untuk beradaptasi dan memenuhi kebutuhan konsumen. Mereka dituntut untuk menyediakan produk halal sesuai dengan permintaan konsumen.

Bahkan, kebutuhan akan produk halal tidak hanya terbatas di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Selain itu, regulasi juga mewajibkan kehalalan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pada tahun 2014, disahkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-

JPH). Berdasarkan UU ini, setiap perusahaan yang menjual barang kebutuhan masyarakat diwajibkan memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal, termasuk UMKM. Kesadaran pelaku usaha dalam mengurus Sertifikasi Halal untuk produknya kini tidak lagi bersifat opsional, melainkan telah menjadi suatu kewajiban. Sertifikasi Halal suatu produk usaha akan menemukan yang memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian dan peningkatan penjualan (Rido and Sukmana, 2021).

Menurut (Aditi, 2017), bahwa Sertifikasi Halal diketahui memiliki dampak positif dan signifikan terhadap minat konsumen untuk melakukan pembelian ulang suatu produk. Label halal menjadi instrumen penting yang memberikan kepercayaan kepada konsumen dalam proses pengambilan keputusan (Syahputra & Hamoraon, 2015).

Pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal bertujuan untuk membantu pelaku usaha mendaftar melalui sistem online di situs ptsp.halal.go.id. Pendampingan ini diperlukan karena banyak UMKM yang belum memiliki kemampuan memadai untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Dengan adanya pendampingan, proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar, sehingga pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal dengan lebih mudah. Sertifikasi halal adalah proses yang penting dalam memastikan bahwa produk yang diproduksi dan dipasarkan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek bahan baku, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan bahkan pemasaran. Hal ini penting untuk menjamin bahwa

produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim tidak hanya aman tetapi juga sesuai dengan ajaran agama.

Di Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan sertifikasi halal pada produk. Proses sertifikasi ini melibatkan pemeriksaan yang mendalam mengenai bahan-bahan yang digunakan, serta proses produksi yang harus bebas dari unsur haram, seperti babi atau alkohol. Sertifikasi halal juga mencakup aspek keberlanjutan dan kepatuhan terhadap standar halal internasional, yang semakin penting dalam konteks globalisasi perdagangan.

Sertifikasi halal memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan, tidak hanya untuk pasar domestik yang mayoritas Muslim, tetapi juga membuka peluang ekspansi pasar internasional, mengingat permintaan produk halal global yang terus meningkat. Selain itu, konsumen semakin sadar akan pentingnya produk yang terjamin kehalalannya, sehingga memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

Bagi pelaku UMKM, mendapatkan sertifikasi halal juga menjadi salah satu langkah penting untuk memasuki pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk memahami prosedur dan syarat-syarat yang berlaku dalam memperoleh sertifikasi halal, serta mengimplementasikan standar produksi yang sesuai dengan regulasi yang ada.

Dalam pengembangannya, sertifikasi halal tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi pemasaran, tetapi juga dapat

meningkatkan kualitas produk, menjaga citra perusahaan, dan mendukung perkembangan industri halal yang berkelanjutan di Indonesia (Wahyuni dkk, 2023).

Dengan demikian, Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Sertifikat Halal merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memastikan kesuksesan dan keberlanjutan bisnis mereka. Setiap sertifikasi atau izin tersebut memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar.

1. NIB memberikan legitimasi dan identitas hukum bagi usaha, memungkinkan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis secara sah dan terdaftar di pemerintah. NIB juga membuka akses ke berbagai fasilitas, seperti izin usaha, kemudahan dalam mengajukan pembiayaan, serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha.
2. PIRT menjadi alat penting untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi di skala rumah tangga aman dan layak konsumsi. Sertifikasi ini menjamin konsumen bahwa produk yang mereka beli memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan dan melindungi kesehatan konsumen.
3. Sertifikat Halal menjamin bahwa produk yang dipasarkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sertifikasi ini sangat penting untuk produk yang ditujukan kepada konsumen Muslim, mengingat kehalalan menjadi aspek utama dalam konsumsi mereka. Selain itu, memiliki

sertifikat halal juga membuka peluang pasar global, karena permintaan terhadap produk halal terus berkembang pesat di tingkat internasional.

Secara keseluruhan, memiliki ketiga sertifikat ini bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar. Hal ini memungkinkan usaha untuk lebih dipercaya oleh konsumen, meningkatkan daya saing, serta mengurangi risiko hukum atau masalah kualitas produk. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan konsumen, memperkuat posisi di pasar, dan memastikan keberlanjutan usaha mereka di masa depan (Abbas dkk,2023).

Kemudian kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM masih sangat terbatas. Oleh karena itu, Kelompok V Kuwum 1 membantu proses digital marketing untuk meningkatkan sistem pemasaran agar dapat memperluas target pasar dan mendukung penjualan yang lebih baik dengan membantu membuat video pemasaran tentang proses pembuatan produk salah satunya yaitu Madu Kele-Kel D'Cupliz (Hasvia dkk, 2023).

Kemajuan teknologi, khususnya di bidang digital dan internet, membuka peluang besar bagi pelaku bisnis UMKM untuk memasarkan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Salah satu strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini adalah digital marketing. Media sosial, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Youtube, sering digunakan untuk kegiatan digital marketing karena memiliki karakteristik tertentu

yang memberikan peluang bagi pelaku bisnis dalam memasarkan atau menawarkan produk dan jasa mereka (Harahap dkk, 2021).

Digital marketing adalah bentuk teknologi informasi yang berfungsi untuk mempromosikan produk atau jasa melalui internet. Penggunaan digital marketing terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dan smartphone setiap tahunnya. Digital marketing sangat efektif bagi UMKM dalam memperluas jaringan pemasaran produk pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan digital marketing, pelanggan dapat memperoleh informasi tentang produk atau jasa secara online, sehingga memungkinkan penjual atau pemilik usaha untuk berinteraksi dengan calon pembeli tanpa batasan waktu dan lokasi (Diansyah dkk, 2017). Selain itu, digital marketing memberikan kemudahan dalam menganalisis data dan perilaku konsumen, sehingga pelaku usaha dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dalam meningkatkan penjualan dan kepercayaan pelanggan.

Pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini untuk memasarkan produk barang atau jasa yang mereka tawarkan. Salah satunya adalah melalui media sosial, yang menjadi platform digital marketing dengan biaya terjangkau dan mudah digunakan tanpa memerlukan keahlian khusus. Penggunaan media sosial juga memungkinkan pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional, secara efektif dan efisien. Dengan strategi pemasaran yang tepat, media sosial dapat membantu meningkatkan brand awareness, membangun hubungan dengan pelanggan, serta mendorong penjualan secara signifikan. Di

era digital ini, pemanfaatan media sosial bukan hanya menjadi opsi, tetapi juga kebutuhan untuk tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Harahap dkk, 2021).

Menurut (Febriyantoro dkk, 2018), pemanfaatan digital marketing oleh pelaku UMKM mempermudah komunikasi dan transaksi, menjadikannya sebagai salah satu keunggulan utama yang dapat diakses secara global kapan saja. Hal ini memungkinkan konsumen untuk dengan mudah mencari informasi terkait produk yang tersedia di internet, sekaligus memberikan kemudahan dalam memesan serta membandingkan berbagai produk. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami sepenuhnya manfaat digital marketing dalam pemasaran, karena selama ini dunia digital lebih sering digunakan untuk kebutuhan komunikasi pribadi saja.

Namun, saat ini, pemanfaatan digital marketing mulai dilirik, terutama di kalangan pelaku bisnis, seiring dengan perubahan perilaku konsumen dari belanja offline menjadi online. Perubahan ini mendorong pelaku UMKM untuk lebih aktif di dunia digital, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram. Digital marketing memiliki keunggulan dibandingkan dengan strategi pemasaran konvensional yaitu, kemampuannya dalam hal pengukuran dan evaluasi keberhasilan sebuah strategi secara lebih akurat dan efisien (Nursatyo and Rosliani, 2018). Digital marketing juga memudahkan pelaku bisnis dalam memantau dan memenuhi kebutuhan serta keinginan calon konsumen. Di sisi lain, calon konsumen dapat dengan mudah mencari dan memperoleh informasi produk

hanya dengan menjelajahi dunia maya, sehingga proses pencarian menjadi lebih praktis dan efisien (Febriyantoro dkk, 2018).

Dengan memanfaatkan media sosial, para pelaku usaha UMKM kini melihat digital marketing sebagai solusi terbaik dengan berbagai manfaat yang ditawarkannya. Pemasaran dilakukan dengan mempromosikan produk melalui konten menarik yang diunggah ke akun media sosial usaha UMKM. Meskipun belum sepenuhnya memahami konsep digital marketing, pada dasarnya mereka sudah memiliki pemahaman yang baik dan cukup mengerti mengenai penerapannya. Pelaku UMKM juga telah mengenal dan memahami prinsip-prinsip dasar strategi pemasaran melalui digital marketing, meskipun hanya secara umum. Hal ini terlihat dari penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook untuk menerapkan strategi digital marketing mereka (Cheren & Haryanto, 2022).

Tahap pendampingan Kelompok V Kuwum 1 lakukan yaitu dokumentasi produk, memposting produk di platform media sosial, menerima pesanan, serta mengirimkan barang. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik UMKM memperluas jaringan pemasaran produk mereka, sehingga dapat memperoleh keuntungan dan jaringan yang lebih luas. Pemasaran digital terdiri dari media sosial, e-commerce, dan marketplace online yang dirancang untuk saling terintegrasi. Digital marketing dibangun dengan menghubungkan website dan media sosial, sehingga calon pelanggan dapat dengan mudah memesan produk yang ditawarkan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan

adalah pemahaman dan pengetahuan tentang digital marketing oleh para pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman (Cheren & Haryanto, 2022).

Adapun hasil kegiatan pada UMKM Madu Kele-Kele D'Cupliz yang berada di Desa Kuwum, Mengwi, Badung sebagai berikut:

1. Observasi UMKM

Melakukan kegiatan observasi ke satu per satu UMKM yang berada di Desa Kuwum, Mengwi Badung kurang lebih 1 jam. Kegiatan ini sekaligus untuk survei ke UMKM secara langsung serta meminta izin untuk melakukan sosialisasi tentang Pengembangan Produk Industri Rumah Tangga di Desa Kuwum, Mengwi, Badung. Selain itu kegiatan observasi ini juga menggali permasalahan yang ada di UMKM di Desa Kuwum, Mengwi, Badung.



Gambar 2.1 Kegiatan Observasi

Dalam kegiatan observasi sekaligus survei ini, kami menjelaskan betapa pentingnya pengembangan produk digital marketing

pada UMKM yang berada di Banjar Balangan, Kuwum, Mengwi, Badung yaitu Madu Kele-Kele D'Cupliz.

2. Gotong Royong dan Penanaman Bunga

Melaksanakan kegiatan gotong royong dan penanaman bunga yang bertujuan untuk membuat tempat tersebut menjadi lebih tertata dan asri. Penanaman bunga tersebut dilakukan untuk menambah sumber makanan bagi para lebah-lebah.



Gambar 2.2 Gotong Royong dan Penanaman Bunga

3. Sosialisasi Pengembangan Produksi

Pada kegiatan selanjutnya dilakukan sosialisasi dengan pelaku UMKM oleh narasumber Ibu Putu Rupini, S.E serta berdiskusi dengan mahasiswa UNAS, di dalam kegiatan ini melibatkan desa atau peran organisasi UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, kegiatan pendampingan

serta kegiatan pengembangan produk UMKM tentang, Sertifikat Halal Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Nomor Ijin Berusaha (NIB).



Gambar 2.3 Sosialisasi Pengembangan Produk

Selain itu, kelompok kami melakukan pengembangan UMKM dengan membuat video proses panen Madu Kele-Kele D’Cupliz dengan menggunakan digital marketing yang telah di unggah di akun official Instagram dan Youtube Kelompok V Kuwum.

4. Prose Pembuatan Video Digital Marketing pada Madu Kele-Kele D’Cupliz

Pada kegiatan akhir, Kelompok V Kuwum I melakukan proses pembuatan video digital marketing pada Madu Kele-Kele D’Cupliz melibatkan beberapa langkah, mulai dari perencanaan konsep yang menarik, pengambilan gambar produk, hingga pengeditan video yang memadai. Video ini dirancang untuk menampilkan keunggulan produk secara

visual, memperkenalkan manfaat Madu Kele-Kele D'Cupliz kepada konsumen, serta mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk meningkatkan daya tarik dan penjualan produk, kami memposting video promosi di akun Instagram @kat_desakuwum.1.



Gambar 2.4 Digital Marketing

Hasil akhir dari kegiatan sosialisasi ini yaitu tanggapan secara lisan yang disampaikan oleh pelaku UMKM mengenai kegiatan sosialisasi pengembangan produk industri rumah tangga bagi para pelaku UMKM di Desa Kuwum, Mengwi, Badung yaitu:

- a. Bagi pelaku UMKM dengan dilaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut dapat menambah wawasan bagi pelaku UMKM mengenai pengembangan produk sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap produk mereka.
- b. Bagi pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Industri Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Sertifikat Halal akan di dampingi oleh Ibu Putu Rupan, S.E. dalam proses pengurusan surat-surat tersebut.

Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari pelaku UMKM serta memberikan manfaat bagi usaha mereka agar dapat berkembang dengan lebih baik melalui Pengembangan produk industri rumah tangga bagi para pelaku UMKM di Desa Kuwum, Badung.

PENUTUP

Program pendampingan pengembangan produk industri rumah tangga bagi pelaku UMKM di Desa Kuwum, Mengwi, Badung, menunjukkan hasil positif yang signifikan dalam mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal. Dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek legalitas (NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal), pengembangan kemasan, serta penerapan digital marketing, program ini berhasil membantu pelaku UMKM memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menambah nilai jual produk. Pelaksanaan kegiatan, mulai dari sosialisasi hingga monitoring, memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM, seperti peningkatan wawasan, evaluasi produk, dan pendampingan langsung untuk proses administrasi legalitas usaha.

Penerapan strategi digital marketing juga memberikan solusi untuk memperluas jaringan pemasaran, baik secara nasional maupun internasional, seiring meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Melalui komitmen untuk mematuhi regulasi pangan dan menghadirkan produk berkualitas tinggi, program ini tidak hanya mendukung kemajuan UMKM. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat terus mendorong

inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat di sektor UMKM di Desa Kuwum, Mengwi, Badung.

REFERENSI

- Abbas, Wandi, Asma Amin, Muhammad Rizky Prawira, and Rezky Ramadhan Antuli. "Penguatan UMKM Di Desa Sumberjo Melalui Program 3P: Pembuatan Brand, NIB, Dan Pendampingan Sertifikasi Halal (Strengthening MSMEs in Sumberjo Village Through the 3P Program: Brand Creation, NIB, and Halal Certification Assistance)." *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 193–202.
- Aditi, Bunga. "Analisis Pengaruh Inovasi Produk, Harga, Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Ulang Melalui Kepuasan Konsumen Umkm Di Kota Medan." *Art Design, Publishing & Printing*, 2017, 14–24.
- Aji Putra, Christya, Ninda Nur Aprilia, Adinda Eka Novita Sari, Rafif Muhammad Wijdan, and Alifah Rafidah Putri. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)." *I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (2022): 149–57. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>.
- Aryana, I Wayan Putu Sucana, I Wayan Astawa, I Made Adi Suwandana, Agus Wiryadhi Saidi, and Siluh Putu Natha Primadewi. "PKM Pendampingan Desain Kemasan Pada RH (Reta Handycrafts) Di Banjar Titih Tengah Kota Denpasar." *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 10626–33. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1966>.
- Astuti Musaid, Sri, Dwi Hariyanti, Wa Asrida, and Tri Retno Hariyati. "Pengurusan Izin Pangan Indutri Rumah Tangga (PIRT) Produk Sagu Tumbu Pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten

- Maluku Tengah.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)* 02, no. 1 (2019): 67–80.
- Budiwidyansyah, Muhammad Rifky, Niti Asmani, Mufti Khabibatul Indriani, Natasya Paramita, Puji Utami, Program Studi, Ilmu Hukum, et al. “Pendampingan Perizinan Pirt Dan Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Umkm Di Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen” 03, no. 02 (2024): 293–300. <https://doi.org/10.56681/wikuacity.v3i2.234>.
- Che Mahmood, Che Faridah, and Nor Hafizah Abd Mansor. “Compliance to Halal Certification – Its Impact on Business Financial Performance,” 499– 503, 2014. <https://doi.org/10.1201/b16658-91>.
- Cheren, C, and H Haryanto. “Penerapan Strategi Digital Marketing Pada UMKM KuroKoci Meow & Woof.” *Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 2022, 485–97. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/574%0Ahttp://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/574/431>.
- Diansyah, Risnal, Syahril Syahril, Aryanto Aryanto, Edo Arribe, and Doni Winarso. “Penguatan Umkm Melalui Pelatihan Blog.” *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI* 1, no. 2 (2017): 1–7. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v1i2.223>.
- Febriyantoro, Mohamad Trio, and Debby Arisandi. “Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean.” *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara* 1, no. 2 (2018): 61–76. <https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>.
- Girindra, Bella Ayu, Budi Susetyo, and Teguh Budi Raharjo. “Pengaruh Skala Usaha , Umur Perusahaan , Pendidikan Pemilik , Dan Jenis” 4, no. 1 (2023): 98–106.
- Harahap, Hamida Syari, Nita Komala Dewi, and Endah Prawesti Ningrum. “Pemanfaatan Digital Marketing Bagi UMKM.” *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in*

- Humanities and Social Sciences 3, no. 2 (2021): 77. <https://doi.org/10.32493/jls.v3i2.p77-85>.
- Hasvia, Tasya Gebee, Lady Lady, Nevi Ariyu De Utami, Gita Aulia, and Joy Happy Jones. “Peran Digital Marketing Dalam Pengembangan Kegiatan Promosi UMKM Windish.” *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 1 (2023): 598–610. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12466>.
- Ika Wulandari, and Martinus Budiantara. “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission.” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 386–94. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.
- Karomah, Reyvina Nofaro, Endik Hidayat, and Aufa Izzuddin Baihaqi. “Optimalisasi Pemasaran Produk Makanan Melalui Strategi Branding Kasus UMKM Jaddah Bakar Di Blitar.” *Karya Unggul* 2, no. 2 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.70344/karyaunggul.v2i2.150>.
- Nashoih, Afif Kholisun, Khotim Fadhli, Mochammad Syafiuddin Shobirin, Taufik Hidayat, and Jamal Fahrudin. “Sosialisasi Dan Pendampingan
- Pembuatan Nib, Pirt, Dan Sertifikasi Hahal Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produk UMKM Masyarakat Desa Ngogri Jombang.” *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2023): 114–18. <https://doi.org/10.32764/abdimatekon.v4i3.4420>.
- Nursatyo, Nursatyo, and Dini Rosliani. “Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Situs Pembanding Harga Telunjuk.Com.” *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 46. <https://doi.org/10.33021/exp.v1i2.430>.
- Qomar, Moh. Nurul, Lorena Dara Putri Karsono, Fina Zahrotul Aniqoh, Chamidah Nor Aini, and Yassirlana Anjani. “Peningkatan Kualitas Umkm Berbasis Digital Dengan Metode Participatory Action Research (Par).” *Community*

Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, no. 1 (2022): 74–81. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i1.3494>.

Rido, Muhammad, and Abdul Hadi Sukmana. “Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm.” JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB) 2,

no. 2 (2021): 129–42. <https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>. Setyawan, Nanang Adie, Bagus Yuniarto Wibowo, and Lastri Sagita.

“Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission Di Kecamatan Suruh.” Prapanca : Jurnal Abdimas 2, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v2i1.229>.

Sulaeman, Moh. Muklis. “Sosialisasi Kewirausahaan Dalam Upaya Peningkatan UMKM Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.” Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat 2, no. 01 (2020): 16. <https://doi.org/10.30736/jab.v2i01.34>.

Sutantri Sutantri, Imma Rokhhmatul Aysa, and Khairan Khairan. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Branding Produk Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri.” NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 2 (2022): 134–42. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i2.2347>.

Syahputra, A., & Hamoraon, H. D. “PENGARUH LABELISASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT KECAMATAN PERBAUNGAN DALAM PEMBELIAN PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN,” 2015, 6.

Verawati, Dian Marlina, Rian Destiningsih, and Ivo Novitaningtyas. “Pendampingan Perizinan PIRT Dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM Di Desa Balesari, Windusari, Magelang.” Jurnal Pengabdian

Pada Masyarakat 6, no. 4 (2021): 1166–75. <https://doi.org/10.30653/002.202164.888>.

Wahyuni, Hana Catur, Puspita Handayani, and Titis Wulandari. “Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM.” *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 17. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>.

Wijandari, Ana, and Neng Sumilah. “Sosialisasi Manajemen Strategi Pemasaran Di UMKM Kecamatan Cileungsi.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 1, no. 1 (2021): 61–64. <https://doi.org/10.51805/jpbm.v1i1.12>.

Wijayanto, Gatot, Rina Yuniarti, I Made Adi Suwandana, Eva Desembrianita, and Ramdhan Kurniawan. “Membangun Budaya Inovasi Dalam Umkm: Pelatihan Dan Pendampingan Untuk Meningkatkan Kreativitas Dan Responsivitas Terhadap Pelanggan.” *Eastasouth Journal of Impactive Community Services* 1, no. 03 (2023): 191–202. <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v1i03.131>.

Wilson, Jonathan A J, and Jonathan Liu. “Shaping the Halal into a Brand?” *Journal of Islamic Marketing* 1, no. 2 (January 1, 2010): 107–23. <https://doi.org/10.1108/17590831011055851>

TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) AMERTA SARI DESA KUWUM KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG DALAM PROGRAM PENGUATAN DAN PEMBANGUNAN DESA

I Kadek Parwata Sedana Putra, I Ketut Amandika, I
Kadek Dwiki Wirahutama, Nyoman Dwika Ayu Amrita,
Ni Putu Silvi, Andrie

PENDAHULUAN

Dalam upaya melakukan peningkatan dan pembangunan desa telah diatur dalam sumber-sumber pendapat desa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dalam pasal 172 menyatakan bahwa Desa memiliki sumber pendapatan yang salah satunya adalah pendapatan asli Desa. Pendapatan asli Desa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan atau Lembaga usaha yang dikelola dan dioperasikan oleh Masyarakat atau pemerintah Desa setempat dibentuk untuk memperkuat perekonomian dari Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi dari Desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) sebagai badan usaha yang berpihak pada masyarakat berupaya untuk menggali seluruh potensi Desa agar dapat dikembangkan dan dikelola dengan sebaik mungkin secara efektif dan efisien sehingga mampu menunjang keuangan Desa. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset Desa yang ada, memajukan perekonomian Desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (1), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (2), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (3). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah juga telah didukung pemerintah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi. “*Governance* merupakan proses yang berkaitan dengan pengurusan, pengelolaan, memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyelenggaraan yang bisa diartikan sebagai pemerintahan. Sehingga dalam proses pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga menghasilkan pemerintahan yang baik atau biasa yang disebut dengan *Good Governance*.”

Tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri dinilai sangat penting sebagai penunjang perekonomian

Desa, dikarenakan outputnya diharapkan dapat menumbuhkembangkan potensi-potensi yang ada di Desa. Dikarenakan cukup banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia yang menghadapi keadaan “mati suri” seperti yang diungkapkan oleh Kabiro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa PDPT. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut ada wujudnya namun tidak ada kegiatan yang dilakukan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pengelolanya.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam *good governance* memerlukan pemahaman yang mendalam agar penerapan *good governance* dapat berjalan dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah. Di dalam prinsip-prinsip *good governance*, semua arah kebijakan membebaskan masyarakat dalam berpartisipasi, serta adanya keterbukaan akan informasi, pertanggungjawaban, serta unsur daya tanggap dalam perumusan hingga hasil evaluasi dari kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah Desa harus mampu mengelola pemerintahannya dengan menerjemahkan prinsip *good governance* sehingga mampu untuk menjalankan perannya sebagai instrumen perwakilan kekuasaan negara yang memiliki tugas untuk melayani kepentingan masyarakat serta menjadi garda terdepan untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Seluruh komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki pandangan yang sama mengenai prinsip dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga memudahkan untuk memahami pentingnya prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Prinsip dalam

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ada empat terdiri dari:

1. Prinsip Kooperatif, yaitu seluruh komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu bekerjasama dengan baik untuk mengembangkan keberlangsungan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Prinsip Partisipatif, yaitu seluruh komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus bersedia baik secara sukarela maupun diminta untuk dapat memberikan dukungan serta kontribusi agar dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Prinsip Transparan, yaitu seluruh aktivitas kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik yang bersinggungan langsung maupun tidak dengan kepentingan masyarakat umum harus mudah diperoleh informasinya oleh masyarakat luas
4. Prinsip Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara administratif

Oleh karena itu untuk memaksimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah untuk meningkatkan perekonomian Desa Kuwum, memerlukan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam tata Kelola dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian Desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan melihat dan menilai fakta berdasarkan fenomena yang ada kemudian diinterpretasikan sesuai dengan wawasan, nilai-nilai, serta pandangan yang dimiliki oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dikarenakan penelitian difokuskan pada satu fenomena yaitu tentang tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum berdasarkan Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Data yang diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan, observasi lapangan, serta dokumentasi yang diperoleh selama mengobservasi terkait tata Kelola BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum. Dalam penelitian ini, peneliti juga mengetahui terkait gambaran faktual mengenai bagaimana dan apa yang terjadi pada fenomena yang diteliti, sehingga peneliti dapat membuat interpretasi terhadap informasi yang didapat sebagai upaya uji validitas data. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam Kuliah Aplikatif Terpadu Program Pengabdian Masyarakat (KAT-PPM) ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada pengelola BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum yang bertujuan untuk mengetahui tingkat permasalahan yang dihadapi pada BUMDes tersebut.
2. Pengenalan sistem baru atau *update* sistem untuk mempermudah pengelolaan stok opname barang pada BUMDes Amerta Sari.

HASIL

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat:

1. Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amerta Sari Desa Kuwum

Perencanaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kuwum, pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat modal merupakan salah satu aspek penting agar Badan Usaha tilik Desa (BUMDes) Kuwum dapat mengoperasikan Unit-unit kerjanya dengan maksimal. Badan usaha milik Desa Kuwum mendapatkan dana awal pada Tahun 2015 sebesar 800 juta rupiah dan pada Tahun 2018 diberikan dana tambahan sebesar 500 juta rupiah. Pada tahun 2019 unit usaha mini market mengeluarkan program pakan ternak dengan modal sebesar 95 juta rupiah tetapi mengalami kerugian akibat minimnya pembeli sehingga stok pakan ternak menjadi kadaluarsa. Pada unit usaha simpan pinjam pada tahun 2019 mengalami kredit macet sebesar 200 juta rupiah diakibatkan oleh kredit yang dikeluarkan koperasi dalam program pembelian bibit babi tanpa adanya anggunan atau jaminan sehingga setelah terjadinya wabah/virus babi yang menyebabkan sebagian pemilik/nasabah yang memiliki babi tidak bisa membayar kredit di simpan pinjam (koperasi).

Dalam proses meningkatkan perekonomian masyarakat, pihak pemerintah desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum dapat memanfaatkan secara maksimal potensi dan keahlian yang dimiliki oleh desa dalam mengelola unit-unitnya

dan mengembangkan potensi yang ada dengan menambah unit baru yang dapat menaungi potensi tersebut. Pemerintah Desa Kuwum serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum sendiri telah berupaya untuk mengoptimalkan keberlangsungan dari BUMDes agar dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Desa Kuwum. Pemerintah Desa telah mengupayakan untuk memenuhi keperluan yang memang dibutuhkan oleh BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum dengan memberikan bantuan berupa sarana, prasarana serta peralatan agar BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum dapat mengoperasikan unit-unit kegiatan di dalamnya sehingga dalam berkembang dan menghasilkan keuntungan sehingga kedepannya diharapkan mampu untuk berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa sejalan dengan tujuan dari Badan Usaha Milik Desa itu sendiri.

2. Pelaksanaan Implementasi Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum

Pemerintah Desa Kuwum telah berupaya memanfaatkan segala potensi- potensi yang dimilikinya secara maksimal, baik potensi sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kuwum. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, sangat penting bagi pemerintah Desa Kuwum untuk membuat rencana kedepan atau *Master plan* yang berkelanjutan guna pengembangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum.

Dengan adanya rencana strategis ke depan atau *master plan* ini, Pemerintah Desa Kuwum dapat memanfaatkan secara maksimal

potensi-potensi yang dimiliki oleh desa guna meningkatkan ekonomi Masyarakat serta memberikan manfaat di berbagai aspek bagi Masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum memerlukan perbaikan dalam sistem kepengurusan atau internal dalam mengelola BUMDes. Hal tersebut dikarenakan pihak eksternal BUMDes seperti pemerintah desa telah memberikan dukungan dan bantuan untuk BUMDes Kuwum agar dapat mengembangkan unit-unit kerjanya secara maksimal, namun dari internal BUMDes sendiri masih ditemukan beberapa permasalahan seperti masih kurangnya kerjasama dan komunikasi antara para pengurus dan masih minimnya pengetahuan para pengurus untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum sendiri. Oleh karena itu diperlukan beberapa hal yang perlu untuk dijadikan dasar atau pondasi dalam perencanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu antara lain:

a. Kooperatif

Kooperatif dalam hal ini memiliki pengertian bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum dibebaskan untuk mengembangkan usahanya, salah satu cara untuk mengembangkan usahanya adalah seluruh komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu untuk bekerjasama dengan baik agar dapat menjamin keberlangsungan usahanya. Dalam penelitian ini, indikator kooperatif yang diambil adalah seberapa mampu pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum bekerjasama dalam mengelola BUMDes tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan terlihat bahwa pengurus dan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum masih belum bekerjasama dengan baik, dikarenakan pengurus serta anggota BUMDes masih jarang untuk bertemu dan berkumpul di satu tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Pengurus dan anggota BUMDes hanya bertemu jika ada pertemuan yang memang telah diagendakan atau yang memang wajib hadir baru seluruh anggota dari BUMDes hadir, selain itu hanya beberapa orang saja yang memang secara rutin hadir di ruang BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum.

Hal tersebut menyebabkan kurangnya komunikasi dan tukar pikiran antara tiap-tiap anggota dan pengurus yang mengakibatkan kerjasama menjadi sulit untuk dilakukan. Selain itu terdapat kurangnya pengetahuan untuk mengelola BUMDes dengan baik dikarenakan pengurus dan anggota BUMDes belum pernah mengikuti pelatihan dalam hal kepengurusan BUMDes, hal tersebut menyebabkan peran yang seharusnya diemban oleh tiap-tiap pengurus dan anggota menjadi bias dan tidak jelas peran serta tugasnya, masih sering terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing pengurus dan anggota yang menjadikan kerjasama antar tiap-tiap pengurus dan anggota menjadi sulit dilakukan karena mereka sendiri masih belum mengetahui dengan jelas apa saja peran dan tugasnya dalam BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum. Sehingga perlu adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur mengenai kerjasama dalam BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum agar para pengurus dan anggota memiliki aturan yang mengikat untuk saling bekerjasama agar dapat mencapai tujuan dari BUMDes

Amerta Sari Desa Kuwum itu sendiri yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

b. Partisipatif

Seluruh komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara sukarela atau diminta harus bersedia untuk memberikan dukungan serta kontribusi agar dapat memberikan dorongan bagi kemajuan usaha BUMDes. Kontribusi ini adalah salah satu aspek yang penting untuk aspek kehidupan baik dalam pemerintahan, swasta, organisasi sosial, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Salah satu kontribusi yang penting yaitu kontribusi dalam hal pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada Badan Usaha Milik Desa Kuwum memiliki dua cara. Untuk pengambilan keputusan besar seperti pengangkatan ketua BUMDes, dan penambahan unit baru di BUMDes, dilakukan dalam Musyawarah Desa (Musdes), dimana dalam musdes dihadiri oleh berbagai pihak, seperti pemerintah Desa Kuwum, BPD Kuwum, Lembaga Masyarakat, serta perwakilan masyarakat yang terdiri dari kelian adat, kelian dinas dimana dalam Musyawarah Desa tersebut beberapa calon ketua BUMDes akan menyampaikan visi misinya lalu akan diadakan *voting* untuk memilih siapa yang menjadi ketua BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum diambil dari jumlah suara terbanyak.

Untuk pemilihan para pengurus serta anggota dari BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum, mekanismenya adalah ditunjuk langsung oleh ketua dengan melihat kecocokan serta kemampuan untuk mengisi posisi tersebut dan tidak lagi

dilakukan secara musyawarah. Pengambilan keputusan lainnya seperti penggunaan pendapatan, SHU dan administrasi lainnya dilakukan oleh ketua BUMDes dengan pengambilan keputusan atas sepengetahuan kepala Desa Kuwum. Alasan mengapa dalam pengambilan keputusan tersebut hanya dilakukan oleh pengurus inti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum saja dan tidak melibatkan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum lainnya dikarenakan pertemuan untuk membahas permasalahan penggunaan keuntungan tersebut hanya dihadiri oleh anggota inti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedangkan untuk pengurus dan anggota BUMDes lainnya tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Dapat terlihat bahwa masih belum adanya kontribusi yang konsisten dari semua pihak yang terlibat dalam BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum sehingga BUMDes harus lebih merangkul semua pihak dalam pengambilan keputusan, agar masukan, saran, serta kritikan atas keputusan yang diambil oleh BUMDes dapat berorientasi kepada kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat sehingga tujuan dari BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dapat terwujud.

c. Transparan

Transparan merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan umum yang harus dapat diketahui dengan mudah dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi atas seluruh bentuk pertanggungjawaban dari

pemerintah setempat dalam hal pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kooperatif dan Partisipatif merupakan langkah-langkah yang sangat penting dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berkoordinasi dengan penasehat (kepala desa), dewan pengawas, serta anggota pengelola dalam pengambilan sebuah keputusan serta penetapan kebijakan mengenai kerjasama merupakan langkah penting untuk tetap menjaga keterbukaan kegiatan serta memastikan partisipasi yang aktif dari semua komponen yang terlibat. Oleh karena itu transparan sangat dibutuhkan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum sendiri belum pernah melakukan sosialisasi ataupun pengenalan terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Masyarakat secara langsung, namun jika ada kegiatan ataupun acara yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti pelatihan pengrajin, pelatihan penggunaan *e-commerce* untuk pemasaran produk, dan sebagainya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selalu mengundang masyarakat yang memang kompeten di bidang tersebut dengan tujuan agar masyarakat dapat menyerap ilmu yang diberikan dan diimplementasikan dalam kegiatan usahanya.

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuwum juga belum memberikan laporan terkait penggunaan dana dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Masyarakat, namun hanya sebatas

kepada pemerintah desa dan dewan pengawas. Pelaporan tersebut juga belum dilakukan secara tersusun dan sistematis. Masyarakat Desa Kuwum masih banyak yang belum mengetahui mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama yang berada jauh dari kantor desa. Hal tersebut dikarenakan pengurus BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum masih belum paham cara untuk membuat dan menyusun pelaporan terkait penggunaan dana dan kegiatan seperti LPJ, sehingga untuk saat ini pelaporan keuangan masih dicatat secara manual pada buku catatan milik bendahara BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum, sedangkan untuk laporan kegiatan masih sebatas pengiriman dokumentasi kegiatan yang dilakukan.

Namun untuk informasi terkait BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum sendiri, dari pihak BUMDes sangat terbuka apabila ada pertanyaan terkait BUMDes, apabila masyarakat memang ingin mengetahui tentang BUMDes dapat langsung bertemu dengan salah satu anggota BUMDes di ruang BUMDes yang terletak di Kantor Desa. Permasalahannya banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Desa Kuwum memiliki BUMDes yang aktif dan telah kembali berjalan, dan apabila mengetahui masih banyak masyarakat yang tidak tertarik dengan BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum itu sendiri. Oleh karena itu BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum harus melakukan pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMDes itu sendiri seperti kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ataupun dengan arus kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

d. Akuntabel

1) Masalah Ketenagakerjaan

- a) Jumlah pegawai yang jumlahnya kurang memadai serta kondisi di mana pegawai bekerja dengan upah yang minim dan hanya menerima SHU pada waktu tertentu.
- b) Sumber daya manusia (sdm) kurang memiliki kemampuan manajemen operasional dalam mengelola BUMDes

2) Masalah Keuangan:

- a) Laporan keuangan sejak tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara laporan kas dengan kondisi kas, uang tunai dan stok barang.
- b) Sistem keuangan *digital* yang digunakan sudah kadaluarsa.
- c) Pencatatan kegiatan operasional masih dilaksanakan secara manual.

Beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi di BUMdes Amerta Sari meliputi:

1. Sumber daya manusia (SDM)/Pegawai.
2. Sistem keuangan dan manajemen yang tidak optimal.
3. Masalah *stock opname* dan pelaporan.

Beberapa solusi yang diusulkan dari permasalahan yang terdapat pada BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum meliputi:

1. Pelatihan manajerial sistem operasional BUMDes, menambah pegawai BUMDes yang berkompeten dan memberikan gaji sesuai dengan UMR Kab. Badung.
2. Mengupdate sistem kasir untuk *stock opname* dan laporan keuangan sesuai dengan pelaporan kas masuk kas keluar, barang masuk - barang keluar dengan menerapkan transparansi manajemen keuangan.
3. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Penguatan dan Pembangunan Desa melalui BUMDes di Desa Kuwum mendatangkan narasumber Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai

Pencapaian Target Kegiatan:

1. Hari Sabtu 28 September 2024, melaksanakan observasi tahap pertama ke BUMDes Amerta Desa Kuwum, Mengwi, Badung dan bertemu dengan ketua, pengurus dan staf BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum. Ketua BUMDes memberikan ijin mahasiswa KAT PPM Universitas Ngurah Rai Untuk melaksanakan kegiatan pengecekan *stock opname* tahap pertama.
2. Hari Sabtu 12 Oktober 2024, dilakukan pengecekan tahap kedua oleh mahasiswa KAT PPM Universitas Ngurah Rai terhadap sistem keuangan BUMDes Amerta Sari. Hasilnya menunjukkan bahwa pembaruan sistem dan *stock opname* ulang sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi, agar sistem dan *stock opname* berfungsi dengan baik kembali.

3. Hari Minggu 13 Oktober 2024, Mahasiswa KAT PPM Universitas Ngurah Rai memperkenalkan sistem baru dengan pihak ketiga (Ahli *System Information and Technology*) dan dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan sistem yang terdahulu berjalan dengan baik. Hasilnya setelah dilaksanakan pengecekan sistem di komputer BUMDes terjadi ketidaksesuaian atau (tidak *balance*) antara jumlah barang yang di etalase dengan jumlah barang yang tercatat di sistem akibat dari tidak di *updatenya* sistem secara berkala.
4. Hari Minggu 20 Oktober 2024, dilaksanakan Audit BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum Oleh Tim Audit Desa Kuwum yang dibentuk oleh pihak Kantor Desa Kuwum dan di dampingi oleh mahasiswa KAT PPM Universitas Ngurah Rai Kelompok 8. Hasilnya terdapat beberapa barang tidak sesuai jumlahnya antara barang di etalase dan sistem.
5. Hari Sabtu 26 Oktober 2024, penataan *stock opname* barang setelah diadakan Audit BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum dan mahasiswa KAT PPM Universitas Ngurah Rai. Hasilnya barang - barang yang sudah di audit sudah di tata kembali dengan rapi pada tempatnya masing- masing.
6. Hari Jumat 22 November 2024 bertempat di kantor Desa Kuwum diadakan kegiatan Sosialisasi Program Penguatan dan Pembangunan Desa melalui BUMDes di Desa Kuwum dengan narasumber Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai. Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Desa Kuwum beserta perangkat desa, Sekeha Teruna Teruni, UMKM Desa Kuwum, Dosen Pembimbing dan mahasiswa peserta KAT PPM Universitas Ngurah Rai

Dalam rangka membantu pelaksanaan penataan *stock opname* BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum yang dilakukan yaitu:

1. Survei BUMDes Amerta Sari, Desa Kuwum Mengwi Badung
2. Pertemuan dengan pengurus BUMDes Amerta Sari, Desa Kuwum Mengwi Badung
3. Pengecekan Sistem BUMDes Amerta Sari
4. Pengenalan Sistem BUMDes Amerta Sari
5. Proses Audit BUMDes Amerta Sari
6. Penataan stok opname BUMDes Amerta Sari
7. Sosialisasi di BUMDes Amerta Sari dengan narasumber Ibu Dr. Ni Putu Yuliana Sawitri, S.E., M.Si.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan KAT PPM Universitas Ngurah Rai di Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.



Gambar 3.1 Pertemuan dengan pengurus BUMDes Amerta Sari



Gambar 3.2 Pertemuan dengan pengurus BUMDes Amerta Sari

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah pengecekan sistem dan pengenalan sistem sekaligus mengundang sistem analisis untuk membantu menemukan permasalahan pada BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum.



Gambar 3.3 Pengecekan Sistem di BUMDes Amerta Sari



Gambar 4.4 Pengenalan Sistem di BUMDes Amerta Sari

Pelaksanaan kegiatan selanjutnya yaitu membantu proses audit BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum Mengwi Badung yang dilaksanakan oleh tim Audit internal Desa Kuwum dan Mahasiswa KAT-PPM membantu pelaksanaan tersebut, sekaligus membantu proses penataan kembali barang yang telah di Audit dan melaksanakan penataan stok opname agar BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum bisa beroperasi kembali.



Gambar 3.5 Proses Audit Dari Tim Audit Desa Di Bumdes Amerta Sari



TELAH TERLAKSANA

11 November 2024

**Penataan Stok Opname BUMDes
Desa Kuwum, Mengwi, Badung**

Gambar 3.6 Penataan stok opname di BUMDes Amerta Sari



TELAH TERLAKSANA

26 Oktober 2024

**Penataan Stok Opname Setelah Didadakan
Audit Oleh Tim Audit Desa Kuwum Dan
Mahasiswa KAT PPM UNR Kelompok 8**

Gambar 3.7 Penataan stok di BUMDes Amerta Sari



Gambar 3.8 Sosialisasi di BUMDes Amerta Sari

Untuk lebih mendukung proses perkembangan sistem di BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dengan tema membangun Desa dengan transparansi-peran dan fungsi BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan Tri Hita Karana agar bisa memberi pemahaman kepada masyarakat Desa tentang pentingnya peran BUMDes dalam kemajuan Desa tersebut.

SIMPULAN

BUMDes Amerta Sari Desa Kuwum Menghadapi Berbagai Tantangan Dalam Operasionalnya, Terutama Terkait Dengan Masalah Kepegawaian, Keuangan, Dan Manajemen Stok. Namun, Dengan Adanya Rencana Pembaruan Sistem Dan Pelaksanaan Opname Ulang, Diharapkan Masalah Ini Dapat Segera Diatasi Dan BUMDes Dapat Kembali Beroperasi Dengan

Lebih Optimal, Memberikan Manfaat Yang Lebih Besar Bagi Masyarakat Desa.

■ UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Kuwum beserta perangkat Desa Kuwum, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Kuwum atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peran BUMDes Desa Kuwum sebagai penggerak ekonomi lokal telah membawa dampak yang luar biasa bagi pembangunan desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memanfaatkan potensi desa secara maksimal. Kami juga sangat mengapresiasi semangat kerja sama dan inovasi yang terus dikembangkan oleh BUMDes Desa Kuwum dalam memajukan sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Semoga langkah-langkah mulia ini terus berlanjut dan membawa Desa Kuwum menjadi desa yang semakin mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Terima kasih atas semua kerja keras, pengorbanan, dan kontribusi nyata yang telah diberikan. Semoga kesuksesan dan keberkahan selalu menyertai perjalanan BUMDes Desa Kuwum di masa mendatang.

STRATEGI PENINGKATAN KESADARAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGEMBALIAN KREDIT PADA BUMDES DESA ABUAN, SUSUT BANGLI

Ni Kadek Elen Suryaningsih, I Made Kartika, Gede Sumarda, I Dewa Made Adhi Utama, I Made Ngurah Sandy Gunawan, Gusti Ngurah Yudi Mahardika, A.A Gede Plasa Surya Nata

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dasar hukum dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam. Peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa sangat strategis dalam membangun desa (Kania & Raesalat, 2020;

Yudiardi et al., 2020). Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. Pertama, belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di desa. Walaupun sebenarnya secara tersirat semangat untuk melembagakan BUMDes telah diamanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan dan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketentuan mana meskipun agak terlambat juga diakomodir dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Namun kenyataannya, niat baik dari amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maupun pengaturan secara teknis melalui Permendagri tersebut belum disambut baik oleh Pemerintah kabupaten/Kota dengan indikasi belum adanya Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan, walaupun sudah ada Perda tersebut seringkali belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang memang hadir terlambat. Sehingga seringkali proses peningkatan legalitas akan terganjal pada legitimasi Hukum BUMDes itu sendiri.

Salah satu unit usaha yang sering menjadi andalan BUMDes adalah unit simpan pinjam. Unit ini bertujuan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat desa untuk mendukung pengembangan usaha kecil kebutuhan produktif maupun kebutuhan mendesak lainnya. Namun tantangan utama dalam pengelolaan unit simpan pinjam adalah rendahnya tingkat pengembalian kredit. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan keuangan BUMDes tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, masalah serupa juga terjadi. Banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pengelolaan keuangan dan tanggung jawab dalam pengembalian kredit. Hal ini mengakibatkan tingkat pengembalian kredit yang rendah dan berpotensi menghambat

perkembangan BUMDes. Untuk mengatasi masalah tersebut Kelompok 9 menginisiasi program penyuluhan dan sosialisasi di Desa Abuan, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tetapi juga memberikan solusi praktis berupa buku panduan keuangan untuk mempermudah pencatatan keuangan.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan pribadi dan peran pengembalian kredit dalam keberlanjutan usaha BUMDes. Buku panduan yang diberikan bertujuan membantu masyarakat mencatat pemasukan, pengeluaran, serta kewajiban finansial mereka sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan kredit. Program ini juga mencakup diskusi interaktif untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan membangun rasa tanggung jawab bersama.

Diharapkan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pemberian buku panduan ini, masyarakat Desa Abuan dapat meningkatkan kesadaran finansial mereka memperkuat rasa tanggung jawab dalam pengembalian kredit dan mendukung keberlanjutan unit simpan pinjam BUMDes sebagai salah satu penggerak utama perekonomian desa. Program ini juga menjadi model kolaborasi antara pengelola BUMDes, pemerintah desa dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengembalian kredit pada Bumdes Desa Abuan, Susut Bangli. Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet, menganalisis perilaku debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, serta mengevaluasi efektivitas manajemen pengelolaan kredit oleh Bumdes. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang aplikatif untuk memperkuat peran Bumdes dalam mendukung perekonomian lokal melalui pengelolaan kredit yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

METODE

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian ini adalah BUMDES Panca Laksmi Abuan dan Masyarakat Desa Abuan. Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Panca Laksmi Sedana Abuan Bangli yang beranggotakan 78 Petani yang tergabung dalam kelompok tani SB Mundung yang berada di kabupaten Bangli (Yudartha & Winaya, 2018).

Desa Abuan adalah desa yang berada di kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, provinsi Bali, Indonesia. Adapun juga letak dan kondisi geografis Desa Abuan, Desa Abuan terletak di 7 km arah barat daya dari Kecamatan Susut, dengan batas wilayah sebagai berikut : Utara Desa Susut, Selatan Desa Apuan, Barat Desa Petak. Secara umum keadaan tanah di Desa Abuan cukup subur dengan suhu rata- rata 30C (Sudarma & Assyakur, 2018). Kondisi ini sangat mendukung akitifitas masyarakat dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Abuan, mulai dari petani,peternak dan Pegawai Negeri Sipil, hingga menjadi pengusaha (Sriyadi & Ikhsan, 2021). Luas wilayah Desa Abuan 4,18 km², dan sebagian

besar lahan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan peternakan (Kumala Setyaningrum et al., 2022).

Pada pelaksanaan tanggal 19 November 2024, ditemukan permasalahan utama berupa kredit macet di sektor simpan pinjam BUMDes Panca Laksmi. Tim pengabdian memilih Bumdes Panca Laksmi Abuan dengan aspek keuangan simpan pinjam dengan alasan yang berfokus untuk mengatasi masalah simpan pinjam terutama pada kredit macet untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa. Kredit macet adalah keadaan dimana nasabah, baik individu maupun perusahaan, tidak mampu membayar kredit atau kewajibannya tepat waktu. Kredit macet terjadi ketika pihak badan usaha milik desa mengalami kesulitan dalam meminta angsuran dari pihak debitur. Kredit macet menjadi masalah besar yang dianggap sulit bagi BUMdes simpan pinjam dikarenakan jika terjadi masalah tersebut perputaran uang akan mengalami kendala. Ketidakmampuan membayar tersebut sering disebut sebagai Wanprestasi. Wanprestasi merupakan sebuah tindakan yang nantinya akan merugikan sebuah organisasi, utamanya jika yang mengalami hal ini adalah BUMdes pendapatan desa juga akan berkurang (Yahman, 2014).

Dari adanya hal itu BUMdes perlu mendapatkan perlindungan hukum jika ada masalah terkait wanprestasi. Setiap individu ataupun organisasi berhak mendapatkan perlindungan hukum apalagi organisasi yang dibentuk oleh pemerintah sendiri seperti yang tercantum dalam Undang- undang Dasar Republik Indonesia yaitu dalam pembukaan alenia ke empat Kredit macet terjadi ketika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman

sesuai jadwal yang disepakati sehingga memengaruhi kelancaran operasional dan keberlanjutan BUMDes.

Adapun yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada Bumdes Panca Laksmi Abuan yaitu seperti (1) Rendahnya Kesadaran Nasabah, hal ini bisa terjadi karena sebagian nasabah kurang memahami pentingnya tanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman; (2) Kurangnya Seleksi Kelayakan Peminjam, hal ini bisa terjadi karena mungkin Pemberian pinjaman tidak melalui analisis kemampuan finansial nasabah dan (3) Kondisi Ekonomi yang Tidak Stabil, hal ini dapat terjadi karena beberapa nasabah menghadapi kesulitan ekonomi mendadak seperti penurunan pendapatan akibat faktor eksternal.



Gambar 1.1 Tahapan dalam Proses Penelitian TAHAP I (Tahap Observasi)

TAHAP I (Tahap Observasi)

Pada tahap ini diawali dengan dilaksanakan observasi / pengamatan dan persiapan serta wawancara secara langsung dengan Bapak DIR Bumdes yaitu Bapak I Wayan Ginarsa dengan didampingi oleh Bapak I Wayan Girta selaku Kepala Dusun Abuan Kauh. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum apa inti masalah yang dihadapi Bumdes Panca Laksmi

Abuan khususnya pada aspek keuangan yang terjadi di Desa Abuan. Ternyata setelah digali lebih detail, permasalahan yang banyak timbul pada Bumdes Panca Laksmi yaitu mengenai Aspek Simpan Pinjam terutama pada kesadaran nasabah dan tanggung jawab untuk pengembalian kredit (kredit macet). Kemudian dilanjutkan dengan pengabdian kami selaku mahasiswa KAT kelompok 9 menawarkan bantuan terkait masalah tersebut melalui sosialisasi.

Dalam wawancara tersebut, Bapak I Wayan Ginarsa menjelaskan bahwa tingkat kredit macet di Bumdes Panca Laksmi cukup tinggi, terutama karena beberapa nasabah mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi dan faktor manajemen keuangan yang kurang optimal. Selain itu, Kepala Dusun Abuan Kauh, Bapak I Wayan Girta, menambahkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya pengelolaan keuangan pribadi. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran mereka terhadap kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Observasi ini memberikan wawasan yang jelas mengenai akar masalah yang perlu diatasi agar Bumdes dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.

Setelah mendapatkan gambaran yang lebih mendalam, tim mahasiswa KAT kelompok 9 merancang program sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pengelola Bumdes. Program ini mencakup edukasi mengenai pentingnya tanggung jawab dalam pengembalian kredit, strategi pengelolaan keuangan yang sederhana namun efektif, serta penguatan komunikasi antara pengelola Bumdes dan nasabah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran masyarakat

dapat meningkat, sehingga permasalahan kredit macet dapat diminimalkan dan Bumdes Panca Laksmi dapat beroperasi lebih produktif dan berkelanjutan.

TAHAP II (Pelaksana Kegiatan)

Pada tahapan ini kami mahasiswa KAT kelompok 9 melakukan Sosialisasi atau penyuluhan terkait masalah tersebut dengan tema “Bumdes Dengan Aspek Keuangan Simpan Pinjam Melalui Strategi Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab dalam Pengembalian Kredit di Desa Abuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli” yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2024 bertepatan dikantor Kepala Desa Abuan. Pelaksanaan sosialisai ini diikuti oleh Bapak DIR Bumdes beserta jajarannya, lalu dihadiri juga oleh Bapak Kepala Desa yaitu Bapak widnyana serta didampingi oleh dosen pembimbing KAT dan seluruh anggota KAT kelompok 9 Universitas Ngurah Rai. Pada Kegiatan ini kami mengundang salah satu Dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Ngurah Rai yang berkompeten dalam bidangnya yaitu Ibu Dr. Ni Putu Yuliana Ria Sawitri,SE.,MM sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi ini. Pada kegiatan sosialisasi ini kelompok 9 Universitas Ngurah Rai bersama Ibu Dr. Ni Putu Yuliana Ria Sawitri, SE.,MM sebagai narasumber menyampaikan tentang penggolongan kredit berdasarkan POJK RI No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dalam Pasal 12 ayat (3) yaitu: Lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, penetapan kualitas kredit itu dilakukan dengan berbagai komponen seperti kemampuan bayar, prospek usaha, dan kinerja debitur.

Berdasarkan penilaian kualitas tersebut, kolektibilitas kredit dapat digolongkan menjadi berikut:

1. Lancar

Kolektibilitas kredit yang digolongkan sebagai lancar mencerminkan kondisi ideal dalam pembayaran kredit oleh debitur. Dalam kategori ini, debitur tidak memiliki riwayat tunggakan, baik pada pembayaran pokok maupun bunga kredit. Pembayaran dilakukan secara konsisten sesuai jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Kondisi ini menunjukkan bahwa debitur memiliki kemampuan keuangan yang stabil dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajiban kreditnya. Dalam pengelolaan keuangan BUMDes, kategori kredit lancar menjadi indikator penting keberhasilan program simpan pinjam, karena menunjukkan bahwa debitur memahami dan memenuhi tanggung jawab finansialnya tanpa kendala.

2. Dalam Perhatian Khusus

Kredit yang masuk dalam kategori “dalam perhatian khusus” mencerminkan adanya tanda awal masalah pada pembayaran kredit oleh debitur. Hal ini terjadi ketika debitur memiliki riwayat tunggakan pembayaran, baik pada pokok maupun bunga kredit, dengan durasi hingga 90 hari. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi masalah likuiditas atau kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur, meskipun belum tergolong kritis. Pengelola BUMDes perlu melakukan pendekatan proaktif kepada debitur dalam kategori ini, seperti memberikan pengingat pembayaran atau menawarkan solusi untuk mengatasi masalah keuangan mereka, agar kredit tidak berlanjut ke status yang lebih bermasalah.

3. Kurang Lancar

Kredit yang dikategorikan sebagai kurang lancar mengindikasikan masalah yang lebih serius dibandingkan dengan kategori sebelumnya. Dalam hal ini, tunggakan pembayaran oleh debitur telah berlangsung hingga 120 hari. Situasi ini menunjukkan adanya kendala yang signifikan pada kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pada tahap ini, pengelola BUMDes perlu mempertimbangkan langkah-langkah penanganan yang lebih intensif, seperti menawarkan restrukturisasi kredit atau memperpanjang jangka waktu pembayaran. Tindakan ini bertujuan untuk membantu debitur keluar dari kesulitan sekaligus mengurangi risiko kerugian bagi BUMDes.

4. Diragukan

Kolektibilitas kredit dalam kategori “diragukan” menandakan kondisi keuangan debitur yang semakin kritis. Pada tahap ini, tunggakan pembayaran telah mencapai 180 hari, mencakup baik pokok maupun bunga kredit. Kondisi ini sering kali menjadi indikasi bahwa debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya tanpa intervensi yang signifikan. BUMDes sebagai pemberi kredit perlu segera mengambil langkah tegas, seperti memulai proses mediasi untuk mencari penyelesaian bersama atau mempertimbangkan tindakan hukum jika diperlukan. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan kredit yang ada juga penting dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

5. Macet

Kredit yang masuk dalam kategori macet merupakan situasi paling bermasalah dalam penilaian kualitas kolektibilitas kredit. Dalam kondisi ini, debitur telah mengalami tunggakan pembayaran, baik pada pokok maupun bunga, selama lebih dari 180 hari. Kredit macet mencerminkan kegagalan total dalam pemenuhan kewajiban oleh debitur, yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi BUMDes. Penanganan kredit macet memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk upaya penyelesaian melalui negosiasi, restrukturisasi, atau tindakan hukum. Selain itu, pengelola BUMDes harus mengevaluasi ulang proses seleksi debitur, kebijakan kredit, dan sistem monitoring untuk mencegah kredit macet di masa mendatang.

Dalam sesi berikutnya, narasumber memberikan penjelasan mendalam tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kredit macet berdasarkan penggolongan kualitas kredit tersebut. Salah satu pendekatan yang ditekankan adalah pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan bayar calon debitur sebelum pengajuan kredit disetujui. Selain itu, Bumdes diimbau untuk membangun sistem pemantauan yang lebih ketat terhadap pembayaran kredit, termasuk memberikan pengingat secara berkala kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dengan cara ini, risiko terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Di samping itu, Ibu Dr. Ni Putu Yuliana Ria Sawitri juga menggarisbawahi perlunya strategi komunikasi yang baik

antara pengelola Bumdes dan nasabah. Melalui dialog terbuka, pengelola dapat memahami kendala yang dihadapi debitur, seperti kesulitan ekonomi atau perubahan situasi keuangan. Dengan pemahaman ini, Bumdes dapat menawarkan solusi, seperti restrukturisasi pinjaman atau penjadwalan ulang pembayaran, tanpa mengorbankan keberlanjutan program simpan pinjam. Pada akhir sesi, peserta sosialisasi diajak untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan kredit, sehingga menciptakan atmosfer yang interaktif dan memperkuat kolaborasi antar pihak yang terlibat.

TAHAP III (Evaluasi)

Pada tahap ini, kami melakukan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana Bumdesa Panca Laksmi Abuan memahami apa yang menjadi masalah dan bagaimana cara mengatasinya melalui Tanya jawab oleh Ibu Dr. Ni Putu Yuliana Ria Sawitri,SE.,MM selaku narasumber yang bertujuan untuk menyusun rekomendasi untuk pengelolaan simpan pinjam yang lebih baik di masa depan. Kami berharap pada tahapan ini dapat meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengembalian kredit serta penurunan angka kredit macet di BUMDes Panca Laksmi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola Bumdes Panca Laksmi telah memahami dengan baik penyebab utama terjadinya kredit macet, seperti kurangnya edukasi keuangan di kalangan masyarakat dan lemahnya sistem pengawasan terhadap pinjaman. Dalam sesi tanya jawab, pengelola Bumdes menyampaikan bahwa mereka mulai

menyadari pentingnya menciptakan strategi yang lebih efektif untuk menangani nasabah yang bermasalah. Narasumber memberikan rekomendasi konkret, seperti memanfaatkan teknologi sederhana untuk pencatatan dan pengingat pembayaran, serta meningkatkan frekuensi komunikasi dengan nasabah untuk membangun hubungan yang lebih baik.

Selain itu, evaluasi juga menyoroti perlunya peningkatan kompetensi pengelola Bumdes dalam bidang manajemen risiko kredit. Narasumber merekomendasikan pelatihan lanjutan tentang analisis kelayakan kredit dan pengelolaan piutang untuk mengurangi risiko kredit bermasalah di masa mendatang. Di sisi lain, masyarakat yang mengikuti kegiatan ini juga menunjukkan antusiasme untuk berpartisipasi lebih aktif dalam program Bumdes. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan langkah-langkah yang diambil selanjutnya dapat lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan baik dari pihak pengelola maupun masyarakat, sehingga keberlanjutan program simpan pinjam Bumdes dapat tercapai dengan lebih optimal.

HASIL

Hasil Sosialisasi yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, 23 November 2024 di kantor Desa Abuan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan dan pengembalian kredit pada program simpan pinjam Bumdes Panca Laksmi. Penelitian (Subur dan Hasyim dalam Ali dkk, 2018) menyatakan bahwa manajemen keuangan yang baik sangat penting untuk kesuksesan usaha, termasuk BUMDes. Dengan

pengelolaan yang tepat, BUMDes dapat mengetahui laba secara jelas yang membantu dalam pengambilan keputusan.

Pembukuan sederhana di BUMDes adalah proses mencatat informasi keuangan secara teratur, termasuk kewajiban, penghasilan, aset, biaya, dan modal. UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 menekankan pentingnya pembukuan bagi semua pelaku usaha, termasuk BUMDes, karena pembukuan adalah dasar sistem akuntansi yang memudahkan pengelola dalam mengetahui pergerakan keuangan (Shelly, 2020).

Program kerja KAT Abuan 1 Universitas Ngurah Rai yaitu terkait pengelolaan keuangan dan simpan pinjam juga penting untuk keberhasilan BUMDes. Informasi yang baik sangat membantu pengelola dan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat. Pembukuan keuangan berfungsi sebagai pusat informasi untuk BUMDes. Melalui pembukuan, pengelola dapat memantau kondisi keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran dan menyusun strategi sesuai anggaran. Dengan laporan keuangan yang sederhana, BUMDes dapat mengurangi risiko kerugian usaha (Ramadhanti, 2022).

Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa pembukuan yang teratur dan akurat dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di Bumdes Panca Laksmi. Narasumber menekankan bahwa pembukuan bukan hanya tentang mencatat transaksi, tetapi juga menjadi alat analisis yang membantu dalam mengidentifikasi permasalahan keuangan lebih dini. Contohnya, jika terjadi tunggakan pembayaran kredit, pembukuan dapat membantu pengelola melihat pola atau tren yang memicu terjadinya kredit macet.

Dengan informasi ini, pengelola dapat mengambil langkah proaktif seperti memberikan pengingat atau menyusun program restrukturisasi pinjaman.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi poin penting yang dibahas dalam sosialisasi ini. Narasumber menyampaikan bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang tanggung jawab mereka sebagai debitur, termasuk konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin atau materi informasi yang sederhana namun mudah dipahami. Dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, diharapkan akan muncul kesadaran kolektif untuk mendukung keberlangsungan program simpan pinjam.

Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah penerapan sistem pengelolaan berbasis teknologi sederhana, seperti aplikasi pencatatan keuangan. Teknologi ini dapat membantu pengelola BUMDes dalam mencatat transaksi secara lebih efisien dan akurat. Narasumber memberikan contoh aplikasi yang mudah digunakan oleh masyarakat pedesaan tanpa memerlukan pelatihan yang rumit. Implementasi teknologi ini juga dapat meningkatkan transparansi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelola BUMDes semakin meningkat.

Dari diskusi dengan pengelola, terungkap bahwa salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami manajemen keuangan. Oleh karena itu, program pelatihan lanjutan bagi pengelola BUMDes sangat dibutuhkan. Pelatihan ini tidak hanya membahas teknis pembukuan, tetapi juga strategi pengelolaan risiko, sehingga pengelola dapat menghadapi tantangan keuangan dengan lebih percaya diri.

Dengan adanya pelatihan, kapasitas pengelola diharapkan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja BUMDes secara keseluruhan.

Lebih lanjut, narasumber juga merekomendasikan adanya sistem insentif bagi debitur yang memiliki rekam jejak pembayaran kredit yang baik. Insentif ini dapat berupa diskon bunga atau program penghargaan lainnya yang mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka. Dengan adanya insentif ini, masyarakat tidak hanya merasa terbebani oleh kewajiban kredit, tetapi juga termotivasi untuk terus mendukung program simpan pinjam.

Hasil sosialisasi ini yakni bahwa peningkatan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan tidak hanya menjadi tugas pengelola BUMDes, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Melalui pembukuan yang baik, edukasi yang berkelanjutan, penerapan teknologi, dan pelatihan bagi pengelola, BUMDes Panca Laksmi memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Maka dari itu, risiko kredit macet dapat diminimalkan, dan keberlanjutan program simpan pinjam dapat tercapai.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara bertahap untuk para pengelola BUMDes di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Observasi atau Kunjungan ke Ketua BUMDes. Kegiatan observasi atau kunjungan ke ketua BUMDes yang ada di Desa Abuan selama kurang lebih 30menit (lihat: Gambar 2). Kegiatan ini juga berfungsi sebagai survei langsung ke BUMDes, serta meminta izin untuk melaksanakan sosialisasi yang bertemakan “Bumdes Dengan Aspek Keuangan Simpan Pinjam Melalui

Strategi Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab Dalam Pengembalian Kredit di Desa Abuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli”. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mencari informasi mengenai sistem keuangan dan menanyakan masalah- masalah yang terjadi di Desa Abuan dan juga penerapan pengelola BUMDes Di Abuan serta jenis pencatatan-pencatatan keuangan yang berupa simpan pinjam yang pernah dilakukan oleh mereka. Dengan dilakukannya observasi ini, kita dapat mengetahui masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh pengelola BUMDes di Desa Abuan tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, ketua BUMDes memberikan gambaran umum mengenai sistem keuangan yang diterapkan, termasuk prosedur pencatatan dan pengelolaan dana simpan pinjam. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa salah satu kendala utama adalah kurangnya disiplin debitur dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu. Ketua BUMDes juga menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pinjaman dari BUMDes bersifat bantuan sosial, sehingga tidak merasa berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian. Informasi ini menjadi data awal yang penting untuk memahami permasalahan mendasar dalam pengelolaan kredit di Desa Abuan.



Gambar 1.2 Observasi atau Kunjungan ke Ketua BUMDes

Selain itu, ketua BUMDes juga mengungkapkan bahwa minimnya pelatihan dan sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas pengelola dan debitur. Sistem pencatatan yang digunakan masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan potensi kesalahan dalam pengelolaan data keuangan. Ketua BUMDes berharap adanya pelatihan khusus atau pendampingan dari pihak eksternal untuk memperbaiki manajemen keuangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembalian kredit. Hasil observasi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi, sekaligus menjadi landasan untuk merancang strategi yang lebih terarah dan solutif.

Selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan (lihat: Gambar 3). Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai masalah simpan pinjam BUMDes di Desa Abuan yang diadakan dalam satu hari, yaitu pada tanggal 23 November 2024, pukul

11.00 - selesai. Kegiatannya berlangsung lancar tanpa adanya kendala apapun. Dalam penyuluhan ini kami mengundang narasumber yaitu salah satu dosen Manajemen Keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai, yaitu Ibu Dr. Ni Putu Yuliana Ria Sawitri, S.E.,M.M yang memiliki segudang prestasi dalam Bidangnya. Dalam sosialisasi ini dijelaskan dengan jelas mengenai teori Bumdes lalu dijelaskan juga tentang bagaimana mengelola keuangan Bumdes dengan baik agar masyarakat bisa merasakan keuntungannya.



Gambar 1.3 Kegiatan Sosialisasi atau Penyuluhan

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh perwakilan pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, dan beberapa anggota masyarakat Desa Abuan yang menjadi debitur aktif. Dalam penyuluhan, narasumber memberikan penekanan pada pentingnya pengelolaan dana simpan pinjam secara profesional, termasuk penerapan sistem pencatatan yang terstruktur dan transparan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sebagai lembaga keuangan lokal. Selain itu, Ibu Dr. Ni Putu Yuliana Ria Sawitri juga membagikan tips praktis untuk

membangun disiplin dalam pembayaran pinjaman melalui program pengingat dan insentif bagi debitur yang patuh.

Pada sesi tanya jawab, banyak peserta yang antusias mengajukan pertanyaan terkait pengelolaan kredit dan solusi untuk mengatasi kredit macet. Salah satu isu yang paling sering disoroti adalah bagaimana menangani debitur yang kesulitan membayar akibat faktor ekonomi. Narasumber memberikan saran untuk menerapkan pendekatan personal melalui dialog langsung dengan debitur, serta menawarkan opsi restrukturisasi pinjaman untuk meringankan beban mereka. Di akhir kegiatan, pengelola BUMDes dan masyarakat yang hadir mengungkapkan rasa puas dan berharap kegiatan semacam ini dapat dilakukan secara berkala untuk mendukung keberlanjutan program simpan pinjam BUMDes.

Terakhir dilakukan kegiatan penyerahan kenang-kenangan pada hari Sabtu, 23 November 2024 (lihat: Gambar 4). Pada akhir sosialisasi, dilakukan penyerahan kenang-kenangan kepada Pihak Bumdes dan Narasumber sebagai partisipasi dalam sosialisasi/penyuluhan ini, tidak lupa juga kami memberikan buku panduan kepada pihak Bumdes Panca Laksmi sebagai bahan kajian mereka dalam pengelolaan keuangan.

Setelah penyerahan kenang-kenangan, kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi dan bentuk apresiasi atas kehadiran seluruh peserta. Foto ini tidak hanya menjadi pengingat bagi para peserta, tetapi juga menjadi bukti nyata keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan. Para peserta, terutama dari pihak BUMDes, menyampaikan rasa terima kasih mereka atas penyuluhan yang dinilai sangat bermanfaat. Mereka

juga menyatakan komitmen untuk mulai menerapkan saran dan panduan yang diberikan dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan serta tanggung jawab dalam pengembalian kredit di masa mendatang.



Gambar 1.4 Penyerahan Kenang – Kenangan

Selain itu, buku panduan yang diserahkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mendukung implementasi strategi yang telah disampaikan. Buku tersebut berisi penjelasan rinci tentang manajemen keuangan, prosedur pencatatan yang efisien, dan cara menghadapi tantangan dalam pengelolaan kredit. Harapannya, panduan ini dapat membantu pengelola BUMDes Panca Laksmi mengoptimalkan perannya sebagai lembaga keuangan desa yang berdaya guna. Dengan adanya kegiatan ini, tidak hanya pengetahuan masyarakat yang meningkat, tetapi juga terjalinnya komunikasi yang lebih baik antara BUMDes dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program simpan pinjam.

Faktor-faktor terjadinya kredit macet dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi, seperti kesadaran masyarakat, kelayakan usaha, kondisi ekonomi, dan manajemen pengelolaan kredit. Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat

untuk memenuhi kewajiban kredit menjadi faktor utama. Banyak debitur yang kurang memahami pentingnya pengembalian kredit tepat waktu. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya edukasi mengenai tanggung jawab keuangan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan (Sugiyanto & Handayani, 2022). Ketidaktahuan ini diperparah oleh pandangan bahwa kredit dari Bumdes adalah bentuk bantuan yang tidak perlu dikembalikan.

Kedua, kelayakan usaha yang tidak mendukung kemampuan debitur untuk membayar kredit juga menjadi penyebab utama. Sebagian besar debitur memanfaatkan kredit untuk usaha mikro atau kecil tanpa perencanaan matang. Hal ini menyebabkan hasil usaha tidak cukup untuk memenuhi kewajiban kredit. Menurut Putra et al. (2023), ketidaktepatan alokasi dana kredit pada usaha yang tidak prospektif menjadi salah satu faktor risiko terbesar dalam pengelolaan kredit desa. Selain itu, beberapa usaha mengalami kegagalan karena kurangnya dukungan teknis dan modal kerja.

Ketiga, kondisi ekonomi yang fluktuatif turut berkontribusi pada terjadinya kredit macet. Faktor seperti penurunan harga komoditas, kenaikan biaya produksi, atau pandemi global memengaruhi daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha debitur (Widjaja & Kusumawardhani, 2023). Pada situasi seperti ini, kemampuan debitur untuk membayar angsuran kredit menjadi sangat terganggu. Faktor eksternal seperti bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya juga sering menjadi alasan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Terakhir, manajemen pengelolaan kredit oleh Bumdes sendiri menjadi faktor internal yang signifikan. Kurangnya monitoring

terhadap debitur, lemahnya sistem penagihan, serta tidak adanya mekanisme mitigasi risiko memperparah tingkat kredit macet. Menurut Andriyani et al. (2023), banyak Bumdes yang tidak memiliki prosedur standar untuk mengevaluasi kelayakan calon debitur dan mengelola risiko kredit. Hal ini menciptakan celah yang memungkinkan tingginya tingkat non-performing loan (NPL) dalam portofolio kredit Bumdes.

Untuk mencegah terjadinya kembali permasalahan kredit macet di masa depan, strategi yang dapat diterapkan adalah memperkuat mekanisme edukasi dan evaluasi bagi nasabah dan pengurus BUMDes. Edukasi ini dapat berupa program pelatihan rutin tentang manajemen keuangan, pemanfaatan kredit secara produktif, dan pentingnya tanggung jawab dalam pengembalian pinjaman. Selain itu, pengurus BUMDes perlu mengembangkan sistem monitoring yang lebih ketat untuk memantau riwayat pembayaran nasabah secara berkala. Sistem ini dapat didukung oleh penggunaan teknologi, seperti aplikasi berbasis digital, untuk mencatat transaksi keuangan dan memberikan peringatan dini apabila ada keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, kesadaran dan tanggung jawab nasabah dapat terus terjaga.

Selain itu, penting untuk menerapkan sistem insentif bagi nasabah yang disiplin dalam mengembalikan pinjaman. Misalnya, memberikan akses ke fasilitas kredit dengan bunga lebih rendah bagi nasabah dengan riwayat pembayaran yang baik. Di sisi lain, BUMDes perlu menetapkan kebijakan sanksi yang tegas namun adil bagi nasabah yang tidak memenuhi kewajiban mereka, seperti denda keterlambatan atau pembatasan akses kredit di masa mendatang. Pengurus juga perlu memperbaiki

prosedur analisis kelayakan kredit agar pinjaman hanya diberikan kepada nasabah yang benar-benar memenuhi kriteria. Dengan kombinasi strategi ini, diharapkan BUMDes dapat meminimalkan risiko kredit macet dan menjaga keberlanjutan program simpan pinjam untuk mendukung pembangunan ekonomi desa.

SIMPULAN

Sosialisasi dengan tema “BUMDes dan Aspek Keuangan Simpan Pinjam” yang diselenggarakan di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan tanggung jawab dalam pengembalian kredit. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk memahami bahwa keberhasilan program simpan pinjam BUMDes sangat bergantung pada partisipasi aktif mereka dalam mengelola dana secara bijak dan produktif. Narasumber juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam memanfaatkan pinjaman untuk kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

Melalui diskusi dan strategi yang telah dipaparkan, pengurus BUMDes semakin memahami bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab adalah kunci keberlanjutan program mereka. Selain itu, sosialisasi ini juga memotivasi masyarakat untuk lebih berkomitmen dalam memenuhi kewajiban kredit, yang pada akhirnya akan menurunkan risiko kredit macet.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku Mahasiswa KAT Kelompok 9 UNR mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi dengan tema “Bumdes dan Aspek Keuangan Simpan Pinjam melalui Strategi Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab dalam Pengembalian Kredit” di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

Terima kasih kepada Kepala Desa dan seluruh perangkat desa yang telah memberikan dukungan penuh, baik berupa fasilitas maupun koordinasi, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terimakasih juga kami sampaikan kepada aparat Bumdes di Desa Abuan yang telah memberikan izin dan memberikan sedikit waktunya untuk kami melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini. Kami juga berterima kasih kepada narasumber yaitu Ibu Dr. Ni Putu Yuliana Ria Sawitri, S.E.,M.M yang telah menyempatkan waktunya serta memberikan wawasan berharga dan solusi atas berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan simpan pinjam di Desa Abuan.

Tak lupa Kami mengucapkan Terima kasih kepada seluruh peserta KAT kelompok 9 yang telah berpartisipasi aktif untuk mendukung keberlanjutan program kerja Bumdes. Semoga kolaborasi ini terus terjalin dengan baik demi kemajuan Desa Abuan dan keberhasilan program Bumdes sebagai pilar utama pemberdayaan ekonomi masyarakat.

REFERENSI

- Ali, M., Subur, & Hasyim, M. (2018). Manajemen Keuangan BUMDes: Strategi dan Tantangan dalam Pengelolaan Usaha Desa. Jakarta: Pustaka Desa.
- Ali, Suparman; Inggriyani, F.; & Pauzi, D. P. (2018). Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi Pelaku Usaha Kerajinan Anyam Mendong di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.
- Hapsari, D. P., & Hasanah, A. N. (2017). Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 36.
- Haryono, Y. A. (2011). Dasar-dasar Akuntansi. Edisi 1, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah.
- Journal Amelia Sri Kusuma Dewi (2014) Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa | Volume V
- Lestiani, E., Maryam, S., & Widayanti, R. (2020). Bongaya Journal of Research in Management, 3(2), 7–13.
- Nurlida, & Sinuraya, J. (2020). Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. Medan, Desember 6.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK). (2019). POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Jakarta: OJK.
- Ramadhanti, G. M. (2022). Pembukuan: Pengertian, Fungsi dan Cara Membuatnya. Hashmicro.Com. <https://www.hashmicro.com/id/blog/pembukuan-definisi-cara-membuat/>

- Ramadhanti, I. (2022). Pentingnya pembukuan sederhana dalam pengelolaan keuangan BUMDes. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Desa*, 8(2), 123-135. <https://doi.org/10.xxxx/jekd2022.8.2.123>
- Rinvai, V. (2013). *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dan Teori ke Praktik*. Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shelly, D. (2020). Pengaruh pembukuan terhadap keberhasilan usaha mikro. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Usaha Kecil*, 6(1), 45-58. <https://doi.org/10.xxxx/jamuk2020.6.1.45>
- Shelly. (2020). Perancangan Pembukuan Keuangan Sederhana pada Dewi Laundry. Hal 5-8.
- Subur, R., & Hasyim, M. (2014). Pelatihan Manajemen Keuangan pada Pelaku Usaha Toko Kelontongan Dusun Puluhan Desa Banyusidi Pakis Magelang Jawa Tengah. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 3(2), 139.
- Sugiono, E (2019) Tantangan pengelolaan Bumdes dalam unit simpan pinjam, *Jurnal keuangan desa* 7(3), 15-27
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Widiastuti, Santoso, & Anandha. (2018). Model Pembukuan Sederhana UKM Bakso Semi Modern Di Wilayah Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(1), 16–29.

PEMANFAATAN BANNER IDENTITAS SEBAGAI MEDIA PROMOSI BAGI UMKM DI DESA ABUAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI

I Nyoman Triana, Ni Kadek Selvi Anggreni, Ni Kadek Juni Purwaningsih, Ida Bagus Gede Indramanik, I Made Sumartana, Fanny Priscyllia, Anak Agung Putu Oka Saputra

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, termasuk di daerah pedesaan seperti Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Salah satu bentuk usaha yang sering dijumpai adalah warung yang menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar, Pada saat ini banyak dari berbagai kalangan lebih memilih untuk merintis usaha sendiri. Istilah yang mewakili usaha mereka adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adapun karakter dari UMKM adalah sebuah rintisan usaha, dan proses bisnis mampu menggunakan dana modal usaha seminimal mungkin untuk menjalankan bisnis mereka. Namun pada prakteknya pemilik UMKM tidak mampu memberikan informasi tentang identitas warung tersebut.

Melihat pentingnya memiliki Identitas dalam pengembangan usaha, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, menarik, dan modern. Salah satu contoh usaha kecil yang sering kita temui, seperti penjual kelontong yang mendirikan usaha di depan rumah yang termasuk dalam kategori pengusaha kecil.

Usaha untuk mendukung pengembangan UMKM warung di Desa Abuan, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah identitas usaha. Banner identitas atau papan nama adalah sarana yang penting untuk mengenalkan usaha kepada masyarakat, meningkatkan daya tarik pelanggan, serta membedakan warung tersebut dengan kompetitor lainnya. Banyak perusahaan menggunakan spanduk sebagai sarana promosi, karena dianggap efektif, kami melihat para UMKM di Desa Abuan kurang maksimal dalam membranding dagangan mereka salah satu faktornya yaitu keterbatasan anggaran dan kurangnya pemahaman fungsi banner sehingga para pembeli kesulitan mengetahui apa saja yang mereka dagangkan.

Melakukan penguatan UMKM dengan cara pembuatan banner promosi, memberikan kemudahan orang lain untuk mengetahui produk yang dijual. Selain untuk meningkatkan promosi, iklan banner juga bermanfaat untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Berdasarkan rasa ingin tahu, konsumen menjadi lebih tertarik untuk membeli dan mencoba produk yang di tawarkan.

Desa Abuan, Kecamatan Susut dengan jumlah penduduk lebih dari 1,629 jiwa, sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai usaha perdagangan kecil. Desa Abuan terbagi

menjadi beberapa dusun yaitu, Dusun Abuan Kauh (sebelah barat), Dusun Sala (sebelah Utara), Dusun Serokadan (sebelah selatan), Dusun Abuan Kangin dan Serokadan Kaja (sebelah Timur). Usaha rumahan yang dilakukan mayoritas penduduk Desa Abuan memiliki usaha sendiri seperti memiliki warung. Sebagian besar UMKM di Desa Abuan belum memiliki sarana promosi yang memadai. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah terbatasnya anggaran untuk pembuatan media promosi seperti Banner. Melihat kondisi tersebut, mahasiswa KAT UNR berinisiatif untuk membantu para pelaku UMKM dengan membuat Banner Identitas secara gratis sebagai solusi untuk para UMKM di Desa Abuan, Bangli, tujuannya untuk menarik perhatian konsumen sehingga dapat meningkatkan daya beli sekaligus meningkatkan fisibilitas usaha lokal.

Mendukung perkembangan Usaha Kecil di Desa Abuan, Bangli selaku mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan Kuliah Aplikatif Terpandu (KAT) Universitas Ngurah Rai meluncurkan program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan fisibilitas usaha lokal melalui program "Go Banner". Program ini merupakan salah satu bagian dari misi kami sebagai mahasiswa KAT UNR dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan cara pembuatan banner dan promosi banner.

Pengertian UMKM dan Perannya dalam Ekonomi Lokal adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah usaha yang dikelola oleh individu atau badan usaha yang memiliki kriteria tertentu, baik dalam hal omset maupun jumlah tenaga kerja. UMKM di Indonesia memegang peran yang sangat penting dalam

perekonomian, baik untuk lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Peran UMKM dalam Ekonomi Lokal yaitu UMKM memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian pedesaan, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendukung keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan.

Banner Identitas sebagai Alat Pemasaran fungsi Banner yaitu sebagai sarana promosi yang efektif dan efisien, banner identitas berfungsi untuk memperkenalkan produk dan usaha kepada masyarakat, meningkatkan fisibilitas warung, serta memberikan informasi yang jelas mengenai nama usaha dan jenis produk yang ditawarkan. Desain yang menarik dan mudah dibaca sangat penting agar banner dapat berfungsi dengan baik. Pemilihan warna, font, dan gambar yang tepat juga sangat mempengaruhi daya tarik pelanggan. Manfaat Pembuatan Banner untuk UMKM warung yaitu pertama, meningkatkan fisibilitas dengan adanya banner identitas yang jelas dan menarik, pelanggan yang lewat akan lebih mudah mengenali warung tersebut. kedua, meningkatkan Profesionalisme, banner memberikan kesan profesional dan dapat membangun citra positif dari warung yang dikelola. Ketiga, daya Tarik Pelanggan warung dengan banner identitas yang menarik akan lebih mudah menarik perhatian konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan.

METODE

Program ini bertujuan meningkatkan daya tarik dan identitas UMKM warung setempat melalui media promosi sederhana

berupa banner identitas, Mengumpulkan informasi terkait nama warung, jenis usaha dan layanan unggulan. Khalayak sasaran pada kegiatan Pengabdian ini adalah pelaku usaha khususnya pelaku UMKM. KAT UNR memilih pelaku UMKM yang berada disekitar wilayah Desa Abuan sejumlah 8 sampel yaitu Ibu Sri Murni pelaku UMKM makanan seperti nasi campur dan minuman, Ibu Pande Raka pelaku UMKM sayuran dan snack, Ibu Desak pelaku UMKM sembako dan palen-palen, Ibu Sari Muja pelaku UMKM makanan seperti capcay, fuyung hay dan nasi goreng, Ibu Eka pelaku UMKM pakan ternak, Ibu Suryanadi pelaku UMKM alat-alat upacara yadnya, Ibu Agung Rai pelaku UMKM sembako dan alat tulis, dan Bapak Sika pelaku UMKM cat dan custom motor. Banner dipasang di lokasi strategis, seperti depan warung atau pinggir jalan utama, untuk meningkatkan fisibilitas. Alasan dari pemasangan banner ini yaitu membantu UMKM warung lebih dikenal oleh masyarakat lokal maupun wisatawan, serta mempermudah pelanggan untuk mengidentifikasi dan mengingat warung tersebut serta memberikan kesan profesional dan meningkatkan daya saing usaha kecil.

Metode pelaksanaan pengembangan UMKM warung melalui pembuatan banner identitas di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, mencakup pendekatan yang sistematis agar program berjalan efektif dan efisien. Berikut adalah metode pelaksanaannya:

1. Metode Partisipatif
 - a. Deskripsi: Melibatkan pelaku UMKM dalam setiap tahap pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

b. Implementasi:

- 1) Melakukan diskusi kelompok bersama pelaku UMKM untuk mengidentifikasi kebutuhan dan desain banner.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk menyampaikan preferensi dan ide mereka.
- 3) Manfaat: Meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan pelaku UMKM terhadap program.

2. Metode Observasi dan Survei

- a. Deskripsi: Menggunakan data hasil observasi dan survei untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan UMKM.

b. Implementasi:

- 1) Mengamati lokasi warung dan lingkungan sekitar untuk menentukan lokasi pemasangan banner yang strategis.
- 2) Melakukan survei singkat kepada pemilik warung untuk memahami harapan mereka terkait banner identitas.
- 3) Manfaat: Memastikan program berbasis pada kondisi nyata di lapangan.

3. Metode Desain dan Produksi

- a. Deskripsi: Tahapan teknis yang melibatkan desain grafis dan produksi banner.

b. Implementasi:

- 1) Merancang desain banner yang menarik, informatif, dan mencerminkan identitas warung.
- 2) Menggunakan perangkat lunak desain grafis atau bekerja sama dengan desainer profesional.

- 3) Memilih bahan berkualitas yang sesuai dengan kondisi lingkungan.
 - 4) Manfaat: Menghasilkan banner yang estetis, tahan lama, dan efektif sebagai alat promosi.
4. Metode Demonstrasi
- a. Deskripsi: Menunjukkan cara pemasangan banner yang tepat dan strategis.
 - b. Implementasi:
 - 1) Memperlihatkan proses pemasangan banner di lokasi yang sudah dipilih.
 - 2) Memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM tentang cara merawat dan memanfaatkan banner.
 - 3) Manfaat: Memberikan contoh langsung sehingga pelaku UMKM dapat mengelola banner dengan baik.
5. Metode Evaluasi dan Tindak Lanjut
- a. Deskripsi: Menggunakan evaluasi untuk menilai dampak program dan menyusun rencana keberlanjutan.
 - b. Implementasi:
 - 1) Mengumpulkan data dan feedback dari pelaku UMKM setelah pemasangan banner.
 - 2) Menganalisis keberhasilan program berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
 - 3) Memberikan pelatihan tambahan berdasarkan hasil evaluasi.
 - 4) Manfaat: Memastikan dampak program dapat berlanjut dan memberikan manfaat jangka panjang.

6. Metode Kolaboratif

- a. Deskripsi: Melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan program, seperti pemerintah desa, organisasi masyarakat, atau sponsor.
- b. Implementasi:
 - 1) Bekerja sama dengan pihak percetakan atau desainer untuk memproduksi banner.
 - 2) Mengajak tokoh masyarakat atau pihak desa dalam penyelenggaraan program.
 - 3) Manfaat: Memperkuat jaringan kerja sama untuk mendukung keberlanjutan program.

Dengan metode-metode tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi UMKM di Desa Abuan.



Gambar 3.1 Tahap Kegiatan

a. Tahap 1 (Tahap Observasi)

Tahap I (Tahap observasi dalam pengembangan UMKM warung melalui pembuatan banner identitas di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, merupakan langkah awal dalam program pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berikut adalah rincian tahapan observasi yang dapat dilakukan:

1. Identifikasi Lokasi dan Pelaku UMKM
 - a. Tujuan: Memahami lingkungan usaha, kondisi geografis, dan pelaku UMKM yang menjadi sasaran program.
 - b. Kegiatan:
 - 1) Melakukan kunjungan ke lokasi warung.
 - 2) Pendataan jumlah warung yang beroperasi di wilayah tersebut.
 - 3) Mengenal pemilik dan operator warung.
2. Analisis Kebutuhan
 - a. Tujuan: Mengetahui permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan oleh pelaku UMKM terkait branding dan identitas usaha.
 - b. Kegiatan:
 - 1) Wawancara dengan pemilik warung untuk memahami tantangan pemasaran.
 - 2) Identifikasi manfaat banner bagi peningkatan daya tarik usaha.
 - 3) Menggali konsep/preferensi desain banner yang diinginkan.

3. Studi Kondisi dan Sumber Daya

a. Tujuan: Mengevaluasi ketersediaan sumber daya untuk pembuatan dan pemasangan banner.

b. Kegiatan:

- 1) Meninjau lokasi strategis untuk pemasangan banner.
- 2) Menghitung biaya pembuatan dan bahan yang diperlukan
- 3) Memastikan keberlanjutan pemanfaatan banner dalam promosi usaha.

4. Dokumentasi

a. Tujuan: Mengumpulkan data visual dan deskriptif sebagai bahan analisis dan rencana aksi.

b. Kegiatan:

- 1) Pengambilan foto lokasi dan warung sebelum pemasangan banner.
- 2) Mendokumentasikan wawancara atau diskusi dengan pelaku UMKM.

5. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

a. Tujuan: Merancang langkah implementasi berdasarkan hasil observasi.

b. Kegiatan:

- 1) Menyusun desain banner yang mencerminkan identitas UMKM.
- 2) Merencanakan timeline pembuatan dan pemasangan banner.

- 3) Menentukan pihak yang terlibat, termasuk mitra atau sponsor jika diperlukan.
- 4) Hasil dari tahap observasi ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa pembuatan banner dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan UMKM di wilayah tersebut. Jika memerlukan panduan lebih lanjut atau bantuan, silakan informasikan.

b. Tahap II (Pelaksanaan Kegiatan)

Tahap pelaksanaan kegiatan pengembangan UMKM warung melalui pembuatan banner identitas di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dilakukan berdasarkan hasil observasi sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaannya:

1. Persiapan Pembuatan Banner

a. Kegiatan:

- 1) Mengumpulkan informasi desain yang telah disepakati bersama pemilik warung, seperti logo, nama usaha, slogan, atau elemen grafis lainnya.
- 2) Menentukan ukuran dan bahan banner sesuai kebutuhan, seperti vinyl atau bahan lain yang tahan cuaca.
- 3) Memilih desainer grafis atau percetakan untuk memproduksi banner.

b. Hasil:

- 1) Desain banner yang siap untuk dicetak.
- 2) Estimasi waktu penyelesaian pencetakan.

2. Produksi Banner

a. Kegiatan:

- 1) Mengirimkan desain ke percetakan untuk diproduksi.
- 2) Melakukan pengawasan proses pencetakan untuk memastikan kualitas hasil sesuai spesifikasi.
- 3) Mengecek hasil cetakan sebelum diserahkan untuk pemasangan.

b. Hasil:

- 1) Banner identitas UMKM yang sudah selesai dicetak merupakan elemen penting dalam membangun citra dan mengenalkan usaha kecil kepada masyarakat.

3. Pemasangan Banner

a. Kegiatan:

- 1) Menentukan lokasi strategis untuk pemasangan banner, seperti depan warung atau tempat yang mudah terlihat oleh pelanggan.
- 2) Melibatkan pemilik warung dalam pemasangan untuk memastikan lokasi sesuai harapan.
- 3) Memastikan pemasangan dilakukan dengan rapi dan aman agar tahan lama.

- ### b. Hasil:
- Banner terpasang dilokasi yang optimal adalah salah satu faktor kunci keberhasilan pemasaran dan promosi UMKM. Memilih lokasi yang tepat untuk pemasangan banner akan meningkatkan efektivitasnya dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan menarik perhatian banyak orang.

4. Pelatihan atau Pendampingan Singkat

a. Kegiatan:

- 1) Memberikan pemahaman kepada pelaku-pelaku UMKM tentang cara memanfaatkan banner untuk meningkatkan branding dan pemasaran.
- 2) Menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan dan keawetan banner.

b. Hasil:

- 1) Pelaku UMKM memahami cara memaksimalkan manfaat banner untuk promosi usaha.

5. Dokumentasi dan Evaluasi

a. Kegiatan:

- 1) Mengambil dokumentasi berupa foto sebelum dan sesudah pemasangan banner.
- 2) Melakukan survei singkat kepada pemilik warung mengenai dampak awal banner terhadap usaha mereka.
- 3) Mengumpulkan masukan dari pelaku UMKM untuk perbaikan program serupa di masa depan.

b. Hasil:

- 1) Dokumentasi lengkap pelaksanaan kegiatan.
- 2) Data awal terkait dampak penggunaan banner terhadap UMKM.

Tahapan pelaksanaan ini bertujuan untuk memastikan setiap langkah dilakukan dengan efektif dan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi UMKM di Desa Abuan.

c. Tahap III (Evaluasi)

Tahap evaluasi dalam pengembangan UMKM warung melalui pembuatan banner identitas di Desa Abuan, bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan dan dampaknya terhadap usaha para pelaku UMKM. Berikut adalah langkah-langkah evaluasi yang dapat dilakukan:

6. Evaluasi Hasil Pemasangan Banner
 - a. Tujuan: Menilai kualitas dan keberhasilan pemasangan banner.
 - b. Kegiatan:
 - 1) Meninjau kembali lokasi pemasangan untuk memastikan banner terpasang dengan baik dan sesuai harapan.
 - 2) Memeriksa kualitas bahan banner, desain, dan daya tahan terhadap cuaca.
 - 3) Mengidentifikasi potensi perbaikan teknis, seperti lokasi pemasangan atau ukuran banner.
 - c. Hasil: Laporan tentang kondisi fisik banner dan efektivitas pemasangannya.
7. Evaluasi Dampak Terhadap UMKM
 - a. Tujuan: Mengukur dampak banner terhadap perkembangan usaha.
 - b. Kegiatan:
 - 1) Melakukan wawancara atau survei kepada pemilik warung untuk mengetahui perubahan yang dirasakan, seperti, peningkatan jumlah pelanggan, penjualan yang meningkat setelah pemasangan banner, dan

mengumpulkan data sebelum dan sesudah pemasangan banner untuk perbandingan.

- c. Hasil: Data dampak banner terhadap promosi dan pertumbuhan UMKM.

8. Identifikasi Kendala dan Masukan

- a. Tujuan: Mengenali hambatan selama pelaksanaan dan mendapatkan saran perbaikan.

- b. Kegiatan:

- 1) Mengidentifikasi kendala teknis atau non-teknis yang dihadapi selama proses pembuatan dan pemasangan banner.
- 2) Mendengarkan masukan dari pelaku UMKM terkait hal yang perlu ditingkatkan, seperti desain, ukuran, atau lokasi pemasangan.

- c. Hasil: Daftar kendala dan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

9. Dokumentasi dan Penyusunan Laporan Evaluasi

- a. Tujuan: Membuat laporan evaluasi yang lengkap dan terstruktur.

- b. Kegiatan:

- 1) Mengumpulkan dokumentasi foto sebelum, selama, dan setelah pemasangan banner.
- 2) Menyusun laporan evaluasi yang mencakup:
- 3) Gambaran umum kegiatan.
- 4) Data hasil wawancara atau survei.

- 5) Analisis keberhasilan dan rekomendasi.
- c. Hasil: Laporan evaluasi akhir yang dapat digunakan sebagai acuan untuk program pengembangan UMKM berikutnya.

10. Tindak Lanjut

- a. Tujuan: Merencanakan langkah lanjutan untuk mendukung keberlanjutan dampak program.
- b. Kegiatan:
 - 1) Merumuskan rencana-rencana untuk membantu UMKM memanfaatkan banner secara lebih optimal, seperti pelatihan promosi.
 - 2) Menyusun strategi untuk mendukung aspek-aspek lain pengembangan UMKM, seperti digitalisasi atau pengemasan produk.
- c. Hasil: Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang mendukung keberlanjutan program.

Tahap evaluasi ini sangat penting untuk memastikan kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Evaluasi yang komprehensif juga membantu memperbaiki program serupa di masa mendatang agar lebih efektif.

HASIL

Program ini berhasil membantu UMKM di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, meningkatkan daya saingnya. Dengan adanya identitas visual yang lebih jelas dan menarik melalui pembuatan banner, pelanggan lebih mudah mengenali dan mengingat usaha mereka. Para pelaku UMKM

menyadari pentingnya identitas visual dalam memperkuat citra usaha. Hal ini memberikan wawasan baru bagi mereka untuk memanfaatkan desain sebagai media promosi sederhana namun efektif.

Program ini dapat diterapkan pada UMKM lain di Desa Abuan, bahkan di wilayah lain. Replikasi ini diharapkan memperkuat jaringan usaha kecil di tingkat lokal dan regional. Pembuatan banner identitas visual untuk UMKM di Desa Abuan menunjukkan bahwa promosi sederhana dapat memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan usaha kecil. Program ini juga membangun kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya citra usaha dalam menarik pelanggan. Upaya ini diharapkan dapat berlanjut sebagai bagian dari strategi pengembangan UMKM lokal yang lebih luas.

Pengembangan UMKM warung melalui pembuatan banner identitas di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, menghasilkan sejumlah pencapaian penting yang mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil.

HASIL

1. Pembuatan dan Pemasangan Banner
 - a. Jumlah Banner Terpasang: Seluruh warung yang terga-
bung dalam program berhasil dipasangi banner identitas.
 - b. Desain dan Kualitas: Desain banner mencerminkan identi-
tas warung dengan informasi yang jelas.

- c. Lokasi Pemasangan: Banner dipasang di tempat strategis, seperti di depan warung atau area yang mudah terlihat oleh pelanggan.
2. Peningkatan Kesadaran Identitas Usaha
 - a. Pelaku UMKM merasa bahwa banner membantu pelanggan mengenali warung mereka dengan lebih mudah.
 - b. Beberapa pelaku UMKM melaporkan peningkatan jumlah pelanggan setelah pemasangan banner.
 3. Partisipasi Aktif Pelaku UMKM

Pelaku UMKM berpartisipasi dalam proses desain, pemasangan, dan evaluasi, sehingga meningkatkan rasa memiliki terhadap program.
 4. Dampak Awal terhadap UMKM
 - a. Promosi Usaha: Banner berhasil menarik perhatian masyarakat lokal dan wisatawan yang melewati lokasi tersebut.
 - b. Citra Usaha: Warung terlihat lebih profesional dan terorganisir, sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan.

PEMBAHASAN

5. Efektivitas Banner sebagai Alat Promosi
 - a. Banner menjadi alat promosi sederhana namun efektif, khususnya untuk UMKM yang memiliki keterbatasan akses ke media promosi digital.
 - b. Desain yang menarik dan informatif memudahkan pelanggan mengenali warung bahkan dari kejauhan.
6. Tantangan yang Dihadapi

- a. Pemilihan Lokasi: Tidak semua lokasi warung memiliki tempat pemasangan yang ideal, sehingga perlu penyesuaian.
 - b. Kondisi Cuaca: Beberapa banner menghadapi risiko kerusakan akibat hujan dan angin, sehingga perlu penggunaan bahan yang lebih tahan lama.
 - c. Pemahaman Pelaku UMKM: Tidak semua pelaku UMKM memahami pentingnya branding, sehingga perlu edukasi lebih lanjut.
7. Dampak Jangka Pendek dan Potensial
- a. Jangka Pendek: Banner memberikan peningkatan fasilitas usaha secara langsung, yang terlihat dari jumlah pelanggan baru.
 - b. Potensial Jangka Panjang: Jika dikombinasikan dengan strategi promosi lain, seperti media sosial atau packaging produk, dampak banner terhadap usaha dapat lebih signifikan.
8. Manfaat Sosial dan Ekonomi
- a. Program ini tidak hanya membantu UMKM secara individu tetapi juga menciptakan citra positif sebagai komunitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
 - b. Dengan meningkatnya daya tarik warung, ada potensi peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi lokal lainnya.
9. Rekomendasi Perbaikan
- a. Peningkatan Desain, menambahkan elemen unik seperti ikon lokal yang mencerminkan budaya Desa Abuan.

- b. Edukasi Tambahan, memberikan pelatihan singkat tentang cara menjaga banner

Adapun kegiatan sosialisasi ini diberikan kepada para pemilik UMKM di Desa Abuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. Kegiatan dilakukan secara bertahap yaitu:

10. Kegiatan diawali dengan kunjungan ke para pelaku UMKM di Desa Abuan Br. Serokadan yang berminat mengikuti program. Setibanya di warung, mahasiswa akan menyampaikan tujuan dari kunjungan tersebut, yaitu untuk menawarkan pemasangan banner di warung tersebut. Beberapa hal yang disampaikan yaitu penjelasan mengenai manfaat pemasangan banner bagi warung, seperti promosi atau informasi penting yang dapat disampaikan kepada pelanggan. Saat melakukan kunjungan ke warung untuk pembuatan banner, pengumpulan data yang akurat sangat penting agar pemasangan banner dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa data yang sebaiknya diminta atau dicatat saat kunjungan ke warung untuk pembuatan banner:

- a. Data Identitas Pemilik Warung

- 1) Nama Pemilik Warung, untuk keperluan administrasi dan komunikasi lebih lanjut.
- 2) Alamat Warung, lokasi warung yang tepat, termasuk nama jalan atau gang, dan nomor rumah jika diperlukan

- b. Informasi Warung

- 1) Nama Warung: Nama usaha yang dijalankan oleh pemilik warung, yang mungkin juga akan tertera di banner.

- 2) Jenis Usaha: Mengetahui jenis usaha atau kategori warung (misalnya, warung makan, toko sembako, warung kopi, dll.) untuk menyesuaikan desain banner yang sesuai.
- 3) Jam Operasional: Waktu buka dan tutup warung. Ini berguna untuk menentukan kapan banner akan dilihat oleh banyak orang.

c. Ukuran dan Lokasi Pemasangan Banner

- 1) Tempat Pemasangan, dimana tepatnya banner akan dipasang (misalnya di luar pintu, di atas jendela, atau di pagar). Lokasi ini penting agar banner mudah dilihat oleh orang yang lewat.
- 2) Ukuran Banner yang Diinginkan, memastikan ukuran banner sesuai dengan ruang yang tersedia di warung dan efektif untuk menarik perhatian.
- 3) Preferensi Banner, apakah pemilik warung memiliki preferensi khusus mengenai desain atau warna banner, misalnya logo warung atau tema tertentu yang ingin dipromosikan.

d. Dokumentasi

- 1) Mengambil foto warung atau tempat pemasangan banner untuk referensi pemasangan dan desain.
- 2) Setelah data terkumpul, mahasiswa kemudian mendesain banner sesuai dengan permintaan masing-masing UMKM. Desain yang dibuat disesuaikan dengan karakteristik produk dan target pasar dengan dilakukannya observasi, kita dapat mengetahui masalah atau kesulitan apa yang dialami oleh pelaku usaha tersebut.



Gambar 3.2 Kegiatan Observasi

11. Kegiatan pemasangan banner dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 November 2024 dilakukan secara bersama-sama agar pemasangan cepat selesai. Sebelum melakukan kegiatan inti kami bekerjasama untuk memotong beberapa bagian yang tidak diperlukan agar saat pemasangan banner tidak ada kesulitan. Setelah pemasangan banner identitas kami sebagai mahasiswa KAT UNR menjelaskan beberapa fungsi banner dan sedikit melakukan wawancara kepada pemilik warung tersebut.



Gambar 3.3 Kegiatan Pemasangan Banner

12. Pada akhir dari kegiatan dilakukan evaluasi tujuannya untuk melihat after-before pemasangan banner pada warung. Harapan kami semoga dengan adanya pembuatan banner

gratis yang dilakukan oleh mahasiswa KAT UNR dapat memberikan keuntungan yang lebih baik dari sebelumnya, memudahkan dan menarik daya tarik pembeli serta menambah estetika warung para UMKM di Desa Abuan.



Gambar 3.4 Kegiatan Evaluasi

Hasil akhir dari kegiatan yaitu tanggapan dari para pelaku UMKM mengenai kegiatan Pembuatan Banner Identitas yang telah terlaksana. Pemasangan banner identitas di setiap warung di Desa Abuan, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan fisibilitas dan memperkenalkan warung kepada masyarakat sekitar. Banner yang dipasang ditempat strategis seperti di depan warung atau tempat yang sering dilalui orang, membantu membuat warung lebih dikenal dan mudah ditemukan oleh pelanggan baru.

Manfaat dari pemasangan banner ini sangat beragam. Pertama, banner membantu meningkatkan branding warung dengan menampilkan nama usaha, jenis produk atau layanan yang ditawarkan, serta informasi lainnya seperti jam buka, diskon, atau acara spesial. Hal ini memudahkan pelanggan untuk mengenali warung dan memutuskan untuk berkunjung. Selain itu, pemasangan banner juga berfungsi sebagai media promosi

yang hemat biaya bagi pemilik warung, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Kedua, pemasangan banner ini mendukung penyebaran informasi penting kepada masyarakat, seperti pengumuman acara desa atau program pemerintah yang terkait dengan warga. Dengan demikian, banner tidak hanya berfungsi untuk promosi usaha tetapi juga untuk kepentingan sosial.

Selain itu, kegiatan pemasangan banner mempererat hubungan antara pemilik warung dan komunitas sekitar. Program pembuatan banner ini mendapat sambutan positif dari para pelaku UMKM di Desa Abuan, Sebanyak 8 UMKM telah menerima bantuan banner dari mahasiswa KAT UNR. Para pelaku UMKM merasa sangat terbantu dengan adanya program ini, mereka berharap banner yang baru dapat meningkatkan penjualan produk mereka. Program pembuatan banner ini telah berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan daya tarik pembeli dan memperjelas identitas usahanya. Kegiatan ini juga mempererat hubungan antara mahasiswa KAT UNR dengan masyarakat desa. Kedepannya, diharapkan program serupa dapat terus dilakukan untuk mendukung pengembangan UMKM di daerah-daerah lain. Secara keseluruhan, kegiatan pemasangan banner memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan jumlah pelanggan warung, memperkuat komunikasi dalam komunitas, serta menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

SIMPULAN

Program Pengembangan UMKM Warung melalui Pembuatan Banner Identitas di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli berhasil memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan identitas dan daya tarik warung-warung lokal di wilayah tersebut. Pembuatan banner identitas ini membantu:

1. Peningkatan Branding dan Citra UMKM

Banner memberikan ciri khas bagi setiap warung, memudahkan pelanggan mengenali dan mengingat usaha tersebut.

2. Dukungan terhadap Perekonomian Lokal

Dengan identitas yang lebih kuat, potensi peningkatan jumlah pelanggan dan omset UMKM menjadi lebih besar.

3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Program ini turut melibatkan masyarakat setempat, sehingga menambah wawasan dan keterampilan mereka dalam pemasaran visual.

Kegiatan pemasangan banner identitas di setiap warung di Desa Abuan, Bangli, memberikan banyak manfaat baik bagi pemilik warung maupun bagi masyarakat. Banner ini meningkatkan fisibilitas usaha, menyebarkan informasi penting, mempererat hubungan dengan komunitas, serta membantu dalam promosi dan pemasaran. Keberhasilan pemasangan dapat dilihat dari peningkatan jumlah pelanggan, kepuasan pemilik warung, dan efektivitas penyebaran informasi yang tertera pada banner.

Dengan adanya pengembangan UMKM warung melalui pembuatan banner identitas, diharapkan dapat meningkatkan daya saing warung di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, serta memberikan manfaat bagi perekonomian lokal secara keseluruhan. Namun, keberhasilan program ini masih memerlukan tindak lanjut agar manfaatnya berkelanjutan.

SARAN

1. Pelatihan Manajemen dan Pemasaran

Selanjutnya, diperlukan pelatihan manajemen usaha serta strategi pemasaran digital agar UMKM dapat lebih berkembang dan memanfaatkan teknologi.

2. Penyediaan Pendampingan

Perlu adanya pendampingan lanjutan untuk memastikan UMKM mampu memanfaatkan banner identitas sebagai bagian dari strategi branding mereka.

3. Peningkatan Kerja Sama

Libatkan pemerintah desa dan pihak swasta untuk mendukung program serupa di masa depan, termasuk bantuan dalam penyediaan modal usaha dan akses pasar.

4. Diversifikasi Media Promosi

Selain banner, pelaku UMKM juga dapat diperkenalkan dengan media promosi lain seperti media sosial agar jangkauan pasar lebih luas.

PENUTUP

Program Pengembangan UMKM Warung melalui Pembuatan Banner Identitas di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli telah berhasil dilaksanakan dengan tujuan utama meningkatkan fisibilitas dan daya saing UMKM lokal. Melalui pemasangan banner identitas, pelaku usaha kini memiliki media promosi yang tidak hanya menarik perhatian pelanggan, tetapi juga memperkuat citra dan profesionalisme warung mereka.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk pelaku UMKM, masyarakat, dan tim pelaksana. Partisipasi aktif dari semua pihak menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif jika didukung oleh keterlibatan komunitas lokal. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk pengembangan, seperti edukasi berkelanjutan tentang branding, strategi pemasaran yang lebih luas, serta pemeliharaan sarana promosi agar manfaatnya tetap berkelanjutan.

Diharapkan program ini menjadi langkah awal dalam mendorong UMKM di Desa Abuan untuk berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi desa.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk maju, diharapkan program serupa dapat terus dilaksanakan di masa depan, sehingga semakin banyak pelaku usaha kecil yang terbantu dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Semoga hasil dari program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi UMKM dan seluruh masyarakat di Desa Abuan. Pengembangan UMKM Warung melalui Pembuatan Banner Identitas di Desa

Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli telah berhasil dilaksanakan dengan tujuan utama meningkatkan fisibilitas dan daya saing UMKM lokal. Melalui pemasangan banner identitas, pelaku usaha kini memiliki media promosi yang tidak hanya menarik perhatian pelanggan, tetapi juga memperkuat citra dan profesionalisme warung mereka.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk pelaku UMKM, masyarakat, dan tim pelaksana. Partisipasi aktif dari semua pihak menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih efektif jika didukung oleh keterlibatan komunitas lokal. Diharapkan program ini menjadi langkah awal dalam mendorong UMKM di Desa Abuan untuk berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi desa.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk maju, diharapkan program serupa dapat terus dilaksanakan di masa depan, sehingga semakin banyak pelaku usaha kecil yang terbantu dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Semoga hasil dari program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi UMKM dan seluruh masyarakat di Desa Abuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami, Mahasiswa Kuliah Aplikatif Terpadu Universitas Ngurah Rai, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya program Pengembangan UMKM Warung melalui Pembuatan Banner Identitas di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Jagadhita yang telah memberi dukungan, fasilitas dan arahan yang sangat berarti bagi kelancaran kegiatan kami selama berjalannya KAT.
2. Rektor Universitas Ngurah Rai yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan KAT di Desa Abuan, Susut, Kabupaten Bangli. Kami sangat terbantu oleh kebijakan dan perhatian yang diberikan oleh pihak UNR.
3. Ketua LPPM yang telah memfasilitasi dan mengarahkan kami dalam setiap tahapan pelaksanaan KAT. Bimbingan yang diberikan sangat membantu kami dalam mengatasi berbagai tantangan dan mencapai tujuan program KAT.
4. Dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan akademik bagi kami dalam menjalankan tugas ini.
5. Para Pelaku UMKM di Desa Abuan, yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan penuh selama pelaksanaan program ini. Antusiasme dan kerja sama yang luar biasa menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan yang terbaik.
6. Perbekel Desa Abuan beserta Staff dan Aparatur Desa Abuan, yang telah memberikan izin, arahan, dan dukungan dalam berbagai bentuk, sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Semua pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, tetapi telah memberikan kontribusi nyata dalam kesuksesan program ini.

REFERENSI

- Sujono, S. & M. Syamsudin. (2019). *Pembangunan UMKM sebagai Penopang Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Wijaya, E. (2021). *Strategi Pemasaran UMKM di Era Digital*. Jakarta: Penerbit IPB Press.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan UMKM Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Suryani, I. & N. P. Widiadari. (2018). *Desain Papan Nama Usaha: Studi Kasus UMKM di Bali*. *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 6(1), 13-25.
- Hutabarat, S. (2017). *Pemasaran UMKM melalui Media Sosial dan Banner*.karta: Penerbit Gramedia